

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI  
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN  
KABUPATEN TAKALAR  
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
RUSTINA  
105730468514**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi  
Keuangan Daerah pada Pemerintahan  
Kabupaten Takalar  
(Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah )**

**RUSTINA**

**10573 04685 14**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

## MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S Al Baqarah: 113)*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al Insyirah: 6-8)*

*Skrripsi ini kupersembahkan untuk:*

- Allah SWT. atas rahmat yang diberikan
- Ibu, Bapak, serta kakak dan adikku tersayang yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan.
- Teman-teman terkasihku NERT, Widyanar<sup>2</sup>, serta seluruh pihak yang selalu men-support dan menyertai...



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah)."

Nama : Rustina  
Nim : 105730468514  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Pembimbing I

Amril, SE., M.Si, AK, CA  
NIDN: 0020087606

Menyetujui

Pembimbing II

Faidul Adziem, SE, M, Si  
NIDN: 0906126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

  
Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Badollahi, SE, M, Si, Ak, CA, GSP  
NBM: 1073428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221






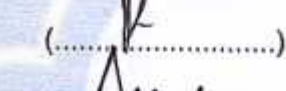
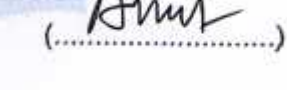
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Rustina, NIM: 105730468514, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009/2018 M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439H  
31 Agustus 2018 M

**PANITIA UJIAN**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. Pengawas Umum : | Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM<br>(Rektor Unismuh Makassar)            |   |
| 2. Ketua           | : Ismail Rasulong, SE., MM<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   |  |
| 3. Sekretaris      | : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM<br>(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji         | :1. Dr. Ansyarif, SE.,M.Si.,Ak                                      |  |
|                    | 2. Drs. Sultan Sarda, MM  |  |
|                    | 3. Muttiarni, SE.,M.Si  |  |
|                    | 4. Amran, SE.,M.Ak,Ak,CA  |  |

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustina  
Stambuk : 105730468514  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

19 Dzulhijjah 1439H

Makassar,

31 Agustus 2018 M

Yang Membuat Pernyataan.



Diketahui Oleh:

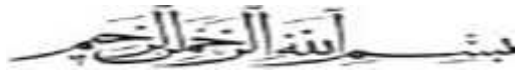
Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP  
NBM: 1073428

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah)”** dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA.CSP selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Amril, SE.,M.Si.AK.CA dan Bapak Faidul Adziem, SE.M.Si selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kedua orang tuaku,serta saudara-saudaraku penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang,.
7. Pimpinan serta pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Takalar yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Buat teman-teman akuntansi 2 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
9. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan



Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

Makassar, 2018

**Penulis**

## **ABSTRAK**

**Rustina, Tahun 2018** Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah), Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Amril dan Pembimbing II Faidul Adziem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada pemerintahan kabupaten Takalar khususnya di instansi Badan pengelola keuangan daerah (BPKD), serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang optimalnya penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD), dan juga upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dapat optimal. Responden dalam penelitian sebanyak 3 orang yang terdiri dari staf anggaran, kepala bidang anggaran, dan juga kepala bidang akuntansi dan pelaporan.

Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para staff pegawai di BPKD serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Takalar dapat dikatakan penggunaannya sudah optimal karena dipengaruhi dari berbagai faktor yaitu sumber daya manusia (SDM), perangkat komputer, keamanan sistem, jaringan internet, akses informasi, efisiensi waktu dan juga SOP.

**Kata Kunci** : Optimalisasi, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

## **ABSTRACT**

**Rustina, (2018)** *Optimization of the use of Financial information system in the area of Government of the Regency Takalar (case study on Financial property management areas), Theses Courses in accounting and Business Economics University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Tutors and Mentors Emery I II Faidul Adziem.*

*This research aims to know the extent to which the optimization of the use of the financial information system (SIKD) in the area of Government of the Regency Takalar property management agencies, particularly in the financial area (BPKD), as well as find out what factors the use of an optimal support be financial information area (SIKD), and also what efforts should be done in order to make use of regional financial information system (SIKD) can be optimized. The respondents in the research as much as 3 people consisting of staff budget, head of the budget, and also the head of aukuntansi and reporting.*

*The data gathered through the interview process directly with the respondent using direct observation, interview guide against the activities of the staff officers in the study documentation and BPKD over related documents. Results of interview and data that has been collected is analyzed with the deskriptip method. The result of this research shows that the use of the financial information system areas on governance of the Regency Takalar can be said to be optimal because its use has been influenced from a variety of factors, namely human resources (HR), the device computers, security systems, jaringa internet, access information, efficient use of the time and also a SOP.*

**Key Words:** *Optimization, Financial Information System Area (SIKD)*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	4
A. Konsep Dasar Sistem Informasi .....	4
B. Konsep Dasar Sistem Informasi Keuangan Daerah .....	5

C. Faktor-Faktor Yang Mendukung Optimalisasi Penggunaan SIKD .....	13
D. Tinjauan Empiris .....	14
E. Kerangka Pikir .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Fokus Penelitian.....	22
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
D. Sumber Data .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
G. Alur Penelitian .....	26
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan/Instansi Pemerintahan.....	27
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	33
1. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) .....	34
2. Faktor-faktor yang Menunjang Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Takalar .....	42
3. Upaya-upaya dalam Mengoptimalkan Penggunaan SIKD .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	17
Tabel 3.1	Skedul Penelitian	23
Tabel 4.1	Data Informan	34
Tabel 4.2	Jaringan Internet	46
Tabel 4.3	Jalur Akses Data Keuangan Daerah	56

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	21
Gambar 3.1	Alur Penelitian	26
Gambar 4.1	Bagan struktur Organisasi	31
Gambar 4.2	Prosedur Penggunaan Awal SIKD	35
Gambar 4.3	Setting Data Pemda	35
Gambar 4.4	Gambar Akun SIKD	36
Gambar 4.5	Alur Rencana Kerja Anggaran (RKA)	37
Gambar 4.6	Alur Dokumen Pelaksanaan Anggaran	37
Gambar 4.9	Alur Surat Perintah Membayar (SPM)	40
Gambar 4.10	Alur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	40
Gambar 4.11	Alur Akuntansi dan Pelaporan	41
Gambar 4.12	Perangkat Komputer	46
Gambar 4.13	Bentuk Penggunaan <i>Password</i>	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem



informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah. SIKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesai sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Dari latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN **KABUPATEN TAKALAR**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan permasalahan adalah apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten Takalar sudah optimal atau tidak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Takalar sudah optimal atau tidak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini digunakan untuk.

1. Peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang Sistem Informasi Keuangan daerah dan bagaimana optimalisasi dari penggunaan system informasi tersebut, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIKD.
2. Pemerintah Daerah, Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sebagai referensi mengenai penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah
3. Akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Sistem Informasi

##### 1. Pengertian Sistem Informasi

Untuk memahami pengertian sistem informasi, harus dilihat keterkaitan antara data dan informasi sebagai entitas penting pembentuk sistem informasi. Data merupakan nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri sendiri lepas dari konteks apapun. Sementara informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

Ada beberapa pendefinisian sistem informasi menurut para ahli dalam Muslihudin (2016) antaranya sebagai berikut :

- a. Menurut *Yacub*, sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan aliran informasi
- b. Menurut *Ida Nuraida*, sistem informasi merupakan perangkat prosedur yang terorganisasi dengan sistematis, bila dilaksanakan akan menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan
- c. *Wing Wahyu Winarno*, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencatat data,

mengolah data dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan dengan baik.

- d. *Sutabri* mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

## **2. Tujuan Sistem Informasi**

Tujuan system informasi menurut Fauzi R.A (2017) yaitu:

- a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen,
- b. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen
- c. Untuk mendukung suatu kegiatan perusahaan atau instansi

## **B. Konsep Dasar Sistem Informasi Keuangan Daerah**

### **1. Pengertian Sistem informasi Keuangan Daerah**

Salah satu teknologi dan sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah sistem informasi keuangan daerah (SIKD). SIKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIKD diolah oleh subdit informasi pengelolaan keuangan daerah pada direktorat pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

## **2. Landasan Hukum Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi pemerintah daerah.

Di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD.

Dengan perubahan terhadap peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat tercapai kepastian hukum. Adapun peraturan terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah, yaitu :

- a. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- c. PP Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

- d. PMK Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
- e. PMK Nomor 74 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Implementasi SIKD di pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan memperlancar jalannya proses pelayanan publik. Implementasi SIKD akan membantu instansi pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* sebab SIKD mampu memperbaiki hubungan antara agen dan principal melalui system informasi yang terintegrasi.

### **3. Tujuan Sistem informasi Keuangan Daerah**

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi sistem informasi keuangan daerah ((SIKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan SIKD dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Proses keuangan pada Pemerintahan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan. Peranan SIKD adalah melakukan pemrosesan dan pengolahan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan pada masing-masing instansi terkait, diharapkan dengan pengimplementasian aplikasi system

informasi dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan pada setiap daerah dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Menurut Rachim., A (2015) pemerintah pusat menyelenggarakan penerapan aplikasi SIKD secara nasional dengan tujuan :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan keuangan daerah
- b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah
- c. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
- d. Membantu menyediakan kebutuhan statistic keuangan daerah
- e. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat
- f. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional

Ini menunjukkan pengimplementasian aplikasi sistem informasi dan teknologi informasi dalam sektor publik, dapat meningkatkan kinerja yang maksimal yang mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektifitas atau kualitas yang lebih tinggi dan penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu dalam perusahaan atau organisasi. Dengan meningkatnya tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan umber daya keuangan daerah maka akan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian semangat desentralisasi,



demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan pada khususnya.

#### **4. Fungsi Penyelenggaraan SIKD**

Menurut Rachim., A (2015) Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Penyusunan standar informasi keuangan daerah
- b. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat
- c. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi
- d. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD
- e. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD
- f. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi, dan pertukaran informasi
- g. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah

#### **5. Kewajiban Daerah**

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dilakukan secara berkala melalui dokumentasi tertulis dan media lainnya dengan batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) dimaksud :

- a. APBD setiap tahun anggaran paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang berkenaan

- b. Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berkenaan
- c. Laporan realisasi APBD per semester paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan
- d. Laporan realisasi APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya
- e. Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya
- f. Informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya
- g. Data yang berkaitan dengan perhitungan Dan Perimbangan seperti data pegawai dan data lainnya disampaikan paling lambat sesuai dengan surat permintaan Menteri Keuangan

## **6. Pengguna SIKD**

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lebih jauh, pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanatkan 6 (enam) regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu :

- a. Wilayah I, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Utara

- b. Wilayah II, yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan
- c. Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat
- d. Wilayah IV, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur
- e. Wilayah V, yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan
- f. Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan

## **7. Strategi Implementasi Aplikasi SIKD**

Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), akan

dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut.

### **C. Faktor-Faktor yang Mendukung Optimalisasi Penggunaan SIKD**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Dalam proses Optimalisasi penggunaan SIKD, erat kaitannya dengan ketersediaan SDM yang mendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, maka dari itu diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM.

#### **2. *Hardware & Software***

*Hardware* merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Sedangkan *Software* merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah sangat dibutuhkannya kelengkapan *hardware* dan *software* dalam menunjang penggunaan SIKD.

#### **3. Estimasi Waktu**

Adanya sistem informasi keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap estimasi waktu pada setiap pekerjaan yang dilakukan karena dapat mempermudah dan mengefesienkan waktu dalam penyusunan informasi keuangan daerah.

#### **4. Akses Informasi**

Sistem informasi keuangan daerah memberikan layanan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan dalam menyediakan informasi yang

memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan serta adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

#### **5. *Standar operating prosedures (SOP)***

Standar prosedur operasi menjadi aspek struktur yang penting dari setiap organisasi karena SOP menjadi pedoman bagi setiap pengguna aplikasi SIKD dalam bertindak

#### **D. Tinjauan Empiris**

Primasari., D (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi SIKD terbukti berpengaruh terhadap kinerja. Adanya implementasi SIKD akan membantu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, informasi laporan keuangan yang berkualitas ini menjadi dasar para pegawai dalam pengambilan keputusan, khususnya pegawai tingkat atas serta dapat dijadikan alat ukur acuan kinerja.

Wartini., N.N dan Murjana., Y.I.G.W. (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintahan Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIKD Pemerintahan Kabupaten Jembrana tergolong efektif. Untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dan survey kepuasan pengguna sistem informasi secara berkala sebagai bahan

evaluasi dan masukan sehinggalah penyelenggaraan sistem informasi menjadi benar-benar efisien, ekonomis, efektif dan akuntabel.

Pirade, D., Saleh A.K., dan Amar, M.Y (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai di Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) SIPKD berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Pemda Kabupaten Tana Toraja. Disimpulkan bahwa persepsi kemanfaatan SIPKD, persepsi kemudahan penggunaan SIPKD, kahlian komputer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai sedangkan kecemasan komputer berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja pegawai.

Darmayani, M.A., Herawati, N.T., dan Atmaja, A.T (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas SDM, penerapan SIPKD, dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan bagian keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Hasil uji secara simultan dapat disimpulkan Kualitas SDM, Penerapan SIPKD, dan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan.

Iriani, S., Suyanto, M., dan Amborowati, A (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Web Kabupaten Pacitan Dengan Menggunakan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan aplikasi SIPKD ditinjau dari faktor-faktor yang diteliti menyebutkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh social, Use Behaviour memiliki penerimaan yang baik terhadap penerimaan teknologi SIPKD, sedangkan facilitating condition memiliki pengaruh yang kurang terhadap penerimaan aplikasi SIPKD di Kabupaten Pacitan sehingga diperlukan pengkajian terhadap faktor ini.

Imran, M., Darwanis dan Arfan, M (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kemudahan Penggunaan Sistem, Kemanfaatan Sistem Dan Keahlian Komputer Terhadap Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem, kemanfaatan sistem dan keahlian komputer secara bersama-sama dan parsial berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sayekti, F., dan Putarta, P (2016) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan penerimaan SIPKD tergantung pada persepsi user. Apabila user menganggap bahwa SIPKD mudah digunakan dan bermanfaat maka mereka akan lebih mudah menerima SIPKD dalam pekerjaan mereka. Bagi

pengambil keputusan mengenai penggunaan sistem informasi di Lembaga Pemerintahan, dengan hasil penelitian ini disarankan untuk melakukan uji coba dan pelatihan pada user sebelum sistem secara resmi diterapkan sebagai suatu keharusan.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Empiris**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Primasari., D (2017)	Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai	Penelitian ini menggunakan metode Anaisis lajur	Implementasi SIKD terbukti berpengaruh terhadap kinerja. Adanya Implementasi SIKD akan membantu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.
2.	Wartini, N.N dan Yasa., I.G.W. M (2016)	Analisis Efektifitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintahan Kabupaten Jembrana	Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa SIKD Pemerintah Kabupaten Jembrana tergolong efektif. Kualitas sistem dan kualitas informasi signifikan berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan pengguna dan secara tidak langsung signifikan berpengaruh terhadap keuntungan atau manfaat sistem bagi organisasi melalui intervening kepuasan pengguna.
3.	Pirade, D.,	Pengaruh	Penelitian ini	Persepsi



	Saleh, A.k., dan Amar, M.Y. (2013)	Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai Di Kabupaten Tana Toraja	menggunakan metode Analisis Path Analysis	kemanfaatan (perceived use fullness) SIPKD berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Pemda Kabupaten Tana Toraja. Persepsi kemudahan penggunaan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Pemda Kabupaten Tana Toraja
4.	Darmayani, M.A., Herawati, N.T., dan Atmaja, A.T. (2014)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng (2014)	Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda	Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap nilai laporan keuangan, penerapan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan bagian keuangan Setda Kabupaten Buleleng
5.	Iriani, S., Suyanto, M., dan Amborowati, A (2014)	Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Web Kabupaten Pacitan Dengan Menggunakan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT)	Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptive	Hasil penelitian ini yaitu penerimaan aplikasi SIPKD dipengaruhi oleh faktor ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh social dan kondisi yang memfasilitasi
6.	Imran, M.,	Pengaruh	Penelitian ini	Hasil penelitian ini

	Darwanis., dan Arfan, M (2014)	Keumudahan Penggunaan Sistem, Kemanfaatan Sistem dan Keahlian Komputer Terhadap Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Banda Aceh (2014)	menggunakan metode pendekatan Kuantitatif	menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem, kemanfaatan sistem dan keahlian computer secara bersama-sama dan persial berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah
7.	Sayekti, F., dan Putarta, P. (2016)	Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif	Kesuksesan penerimaan SIKD tergantung pada persepsi user. Apabila user menganggap bahwa SIKD mudah digunakan dan bermanfaat maka mereka akan lebih mudah menerima SIKD dalam pekerjaan mereka.

### E. Kerangka Pikir

Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 merupakan proses yang mendukung dan menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya,

maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang tersebut diatas dibuatlah sebuah sistem yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005.

Sistem informasi keuangan dapat memberikan informasi yang berguna bagi suatu instansi pemerintahan terutama bagi akuntan dalam menjalankan aktivitasnya. Sistem informasi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan hasilnya nanti akan didistribusikan ke para pengguna. Salah satu tujuan sistem informasi keuangan daerah adalah untuk menunjang efektivitas penyajian laporan keuangan perusahaan. Dalam mengelola laporan keuangan, pimpinan memerlukan informasi mengenai segala sesuatu yang terjadi perusahaan. Informasi yang dihasilkan harus merupakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan serta informasi yang dihasilkan harus bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemakainya.

Penyajian laporan keuangan lebih efektif apabila dalam pelaksanaannya didukung dengan sistem informasi yang memadai. Sistem informasi keuangan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dalam melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem informasi keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat tinggi dalam mengefektifkan penyajian laporan keuangan. Selain dapat menunjang efektivitas penyajian

laporan keuangan, sistem informasi keuangan daerah juga dapat membantu kelancaran operasional suatu instansi apabila suatu instansi menggunakan sistem tersebut secara optimal.



**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran Optimalisasi penggunaan SIKD**

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, serta data-data lain yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.

#### **B. Fokus Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada pemerintahan Kabupaten Takalar sudah optimal atau tidak.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman N0.26 Takalar, Sulawesi Selatan.

##### **2. Waktu penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Takalar dengan pertimbangan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang

jadi objek penelitian. Dan untuk penelitian yang dilakukan kurang dari dua bulan yaitu bulan April hingga Juni tahun 2018.

#### **D. Sumber Data**

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian.(Siregar, 2012).

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami terkait dengan SIKD.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penunjang bagi penyusunan penelitian ini, data ini diperoleh dari informasi berupa buku, internet, *literature* lain atau data yang sudah ada seperti penelitian ekonomi tentang audit internal yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang valid dan reliable. Dalam penelitian ini teknik dan pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

### 1. Observasi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan mengamati Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan pada instansi pemerintahan khususnya di Badan pengelola keuangan daerah Takalar. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan dan sebagai bahan informasi atas data penelitian.

### 2. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan penulis dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan Tanya jawab langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang terkait dengan pokok permasalahan. Wawancara ini dilakukan dengan berdialog langsung dengan pimpinan dan para staff di Badan pengelola keuangan daerah Takalar.

### 3. Dokumentasi

Yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dalam memperoleh data ini metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian yang diperoleh sehingga mampu

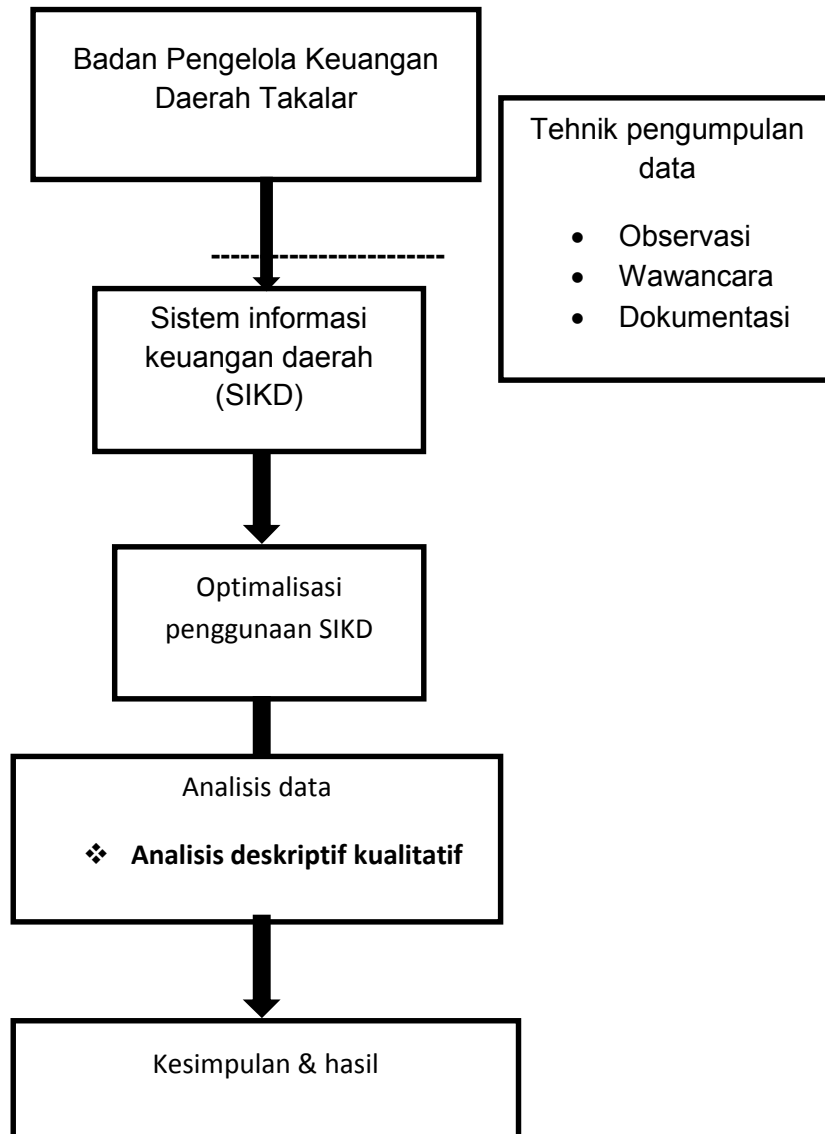
memberikan informasi tentang optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Takalar khususnya pada BPKD. Adapun model pengukuran optimalisasi yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan memakai teori dari O'brien dan Marakas (2009) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang menyebabkan optimal tidaknya penggunaan dari sebuah sistem dapat diukur dari segi sumber daya manusia (SDM), hardware dan software yang ada, keamana sistem, akses informasi dan juga dari segi standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh data-data tersebut peneliti pun menggunakan 3 informan yaitu pertama dari staf pegawai anggaran, kedua dari kepala bidang anggaran, dan terakhir dari kepala bidang akuntansi dan pelaporan untuk membantu peneliti dalam teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi dan juga sumber data yang telah ada.

Analisis kualitatif adalah metode analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistic atau dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk pertanyaan dari uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis. Analisis kualitatif sebagai prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dimana data yang didapat berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini menggambarkan mengenai optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten Takalar khususnya pada BPKD.



### G. Alur Penelitian

Adapun alur/desain penelitian yaitu :



**Gambar 3.1 Alur penelitian**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan/Instansi Pemerintahan**

##### **1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi**

Suatu daerah atau wilayah dapat tumbuh dengan sendirinya secara alamiyah tanpa rencana, namun pertumbuhan dan perkembangan secara alamiyah tersebut belum tentu sesuai dengan yang di harapkan dan belum tentu dengan kaidah dan norma serta kriteria yang dijabarkan dalam teori ilmu perencanaan kota dan wilayah (planologi)

Prof. Dr. Puernomosadi Jasarosa, MT, Dalam buku prosedur standar perencanaan wilayah” berpendapat, bahwa cikal bakal suatu daerah atau wilayah baik perkotaan maupun perdesaan pertama tama atau pada awalnya muncul sebagai “Titik Simpul Jasa Distribusi” dimana pada titik simpul jasa distribusi tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan pokok yaitu jasa perdagangan dan jasa transportasi yang kemudian pada fase berikut diikuti dengan terbentuknya sarana pasar dan terminal atau pelabuhan pada daerah pesisir pantai. Ketiga sarana tersebut (Pasar, Terminal, Pelabuhan) adalah suatu elemen yang memiliki daya tarik yang sangat kuat dan merupakan faktor penarik (Pull Faktor) atau faktor pendorong (Push faktor) bagi manusia / penduduk untuk datang bermukim di sekitar sarana tersebut yang lambat laun membentuk suatu komunitas perkotaan (Urban Community) ataupun komunitas perdesaan (Rural Community) pada sisi lain, pertumbuhan dan

perkembangan suatu daerah atau wilayah suatu daerah secara garis besar di tentukan oleh 3 (Tiga) aspek pokok yaitu :

- a. Fisik meliputi posisi geografis batasan dan tataguna lahan prasarana dan lahan serta fasilitas dan utilitas.
- b. Aspek Sosial , meliputi kuantitas dan kualitas kependudukan . penduduk yang banyak dengan kualitas yang tinggi adalah potensi dan sumberdaya pembangunan, tetapi sebaliknya penduduk yang banyak dengan kualitas yang rendah adalah beban dari pembangunan itu sendiri.
- c. Aspek Ekonomi, meliputi = ekonomi makro dan ekonomi mikro, sumberdaya alam dan kegiatan usaha.

Baik dari sisi historis terbentuknya suatu daerah atau wilayah bermula selaku " Titik simpul Jasa Distribusi " maupun dari sisi potensi sumberdaya suatu daerah dan wilayah ( Fisik ,Sosial, Ekonomi ) ; yang apabila diuraikan dan dibahas lebih lanjut secara sistematis berdasarkan berbagai disiplin ilmu, maka semuanya akan bermuara pada aspek modal yaitu " Keuangan " .

Begitu penting dan strategisnya aspek keuangan dalam proses kehidupan dan pembangunan, maka perlu penanganan dan kebijakan yang strategis pula untuk itu, dalam struktur organisasi pemerintah Kabupaten Takalar dibentuk suatu organisasi satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas tata kelola keuangan daerah , yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

## **2. Visi dan Misi Organisasi**

### **a. Visi**

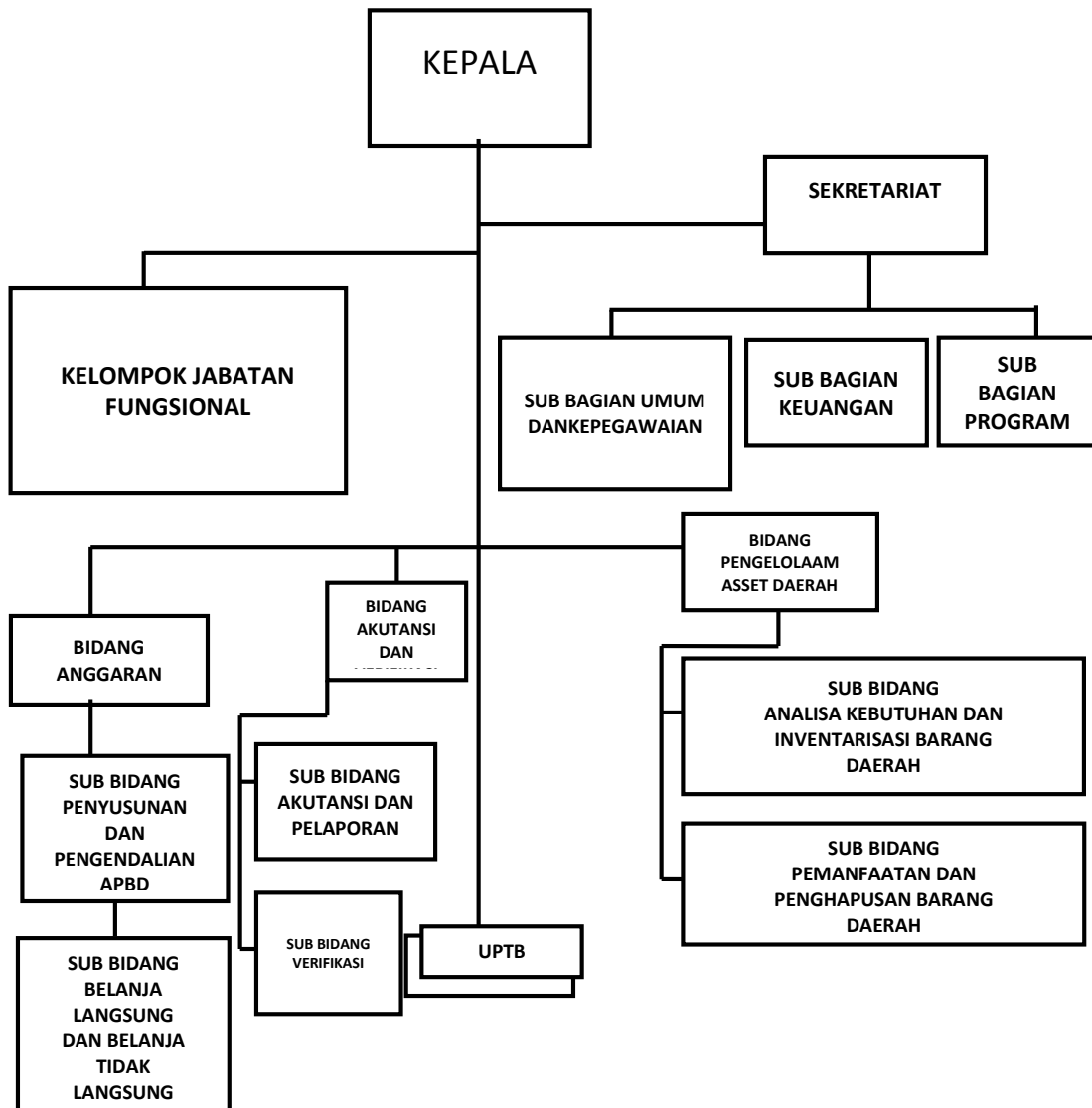
Visi Kabupaten Takalar periode tahun 2013 sampai 2017 yaitu “ Takalar Terdepan Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan, Beriman Dan Bertakwa ”

### **b. Misi**

1. Memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh penatausahaan yang tertib
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah
4. Memaksimalkan pendapatan daerah melalui dana transfer dan bantuan keuangan
5. Memaksimalkan pengelolaan aset daerah

### 3. Struktur Organisasi dan Job Description

#### a. Struktur Organisasi



Gambar 4.1

**Bagan Struktur Organisasi Badan  
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar**

b. Job Description

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No. 21 tahun 2014 tentang tugas dan fungsi jabatan struktural, maka uraian tugas masing – masing jabatan dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar :

1) Kepala BPKD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, dan pengendalian, serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatalaksanaan Dinas yang meliputi: surat-menyurat, kearsipan, pengandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan urusan rumah tangga, serta urusan administrasi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan.

c) Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pelaksanaan urusan data dan informasi, penyusunan rencana kerja dan monitoring, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

3) Kepala Bidang Akuntansi dan Belanja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan daerah di dibidang Akuntansi dan Belanja.

a) Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas realisasi pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta menyiapkan laporan keuangan.

b) Kepala Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung Kepala Seksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung mempunyai tugas melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

#### 4) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan program standarisasi, perencanaan, pengadaan, penghapusan, pelelangan, inventarisasi, Penertiban/Pengamanandan pengendalian/pengawasan pengelolaan asset serta pembinaan administrasi barang dan pengelolaan investasi baik dalam bentuk uang maupun aktiva lainnya serta kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan dan pengelolaan asset.

- a) Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang mempunyai tugas melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, penilaian, pengawasan, analisa kebutuhan dan inventarisasi barang.
- b) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang mempunyai tugas melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan pemanfaatan dan penghapusan barang-barang.

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Informan tersebut adalah para pimpinan maupun staf pengelolaan



keuangan yang terdiri dari staf anggaran, kepala Bidang Anggaran dan juga kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. Untuk keakuratan data mengenai informan maka diperlukan penjelasan mengenai data informan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1 Data Informan**  
**Sumber : BPKD Takalar Tahun :2018**

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Yulianti Mochtar	P	Staff Anggaran
2	Lahamuddin	L	Kabid. Akuntansi & Pelaporan
3	Hairuddin	L	Kabid. Anggaran

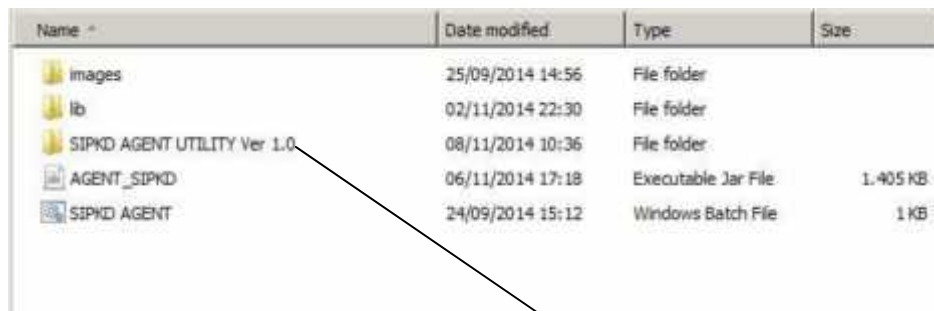
Dari hasil wawancara tersebut maka selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka perlu diuraikan

#### **1. Sistem informasi keuangan daerah (SIKD)**

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Aplikasi agen SIKD dikembangkan dengan java desktop, sehingga dapat digunakan pada semua platform operating sistem. Database SIPKD dikembangkan menggunakan MS SQL Server maka hubungan aplikasi agen SIPKD otomatis sudah ditetapkan dengan MS SQL Server.

Ketika pengguna pertama kali menggunakan aplikasi agen SIKD, lakukan double klik pada file AGENT\_SIKD.



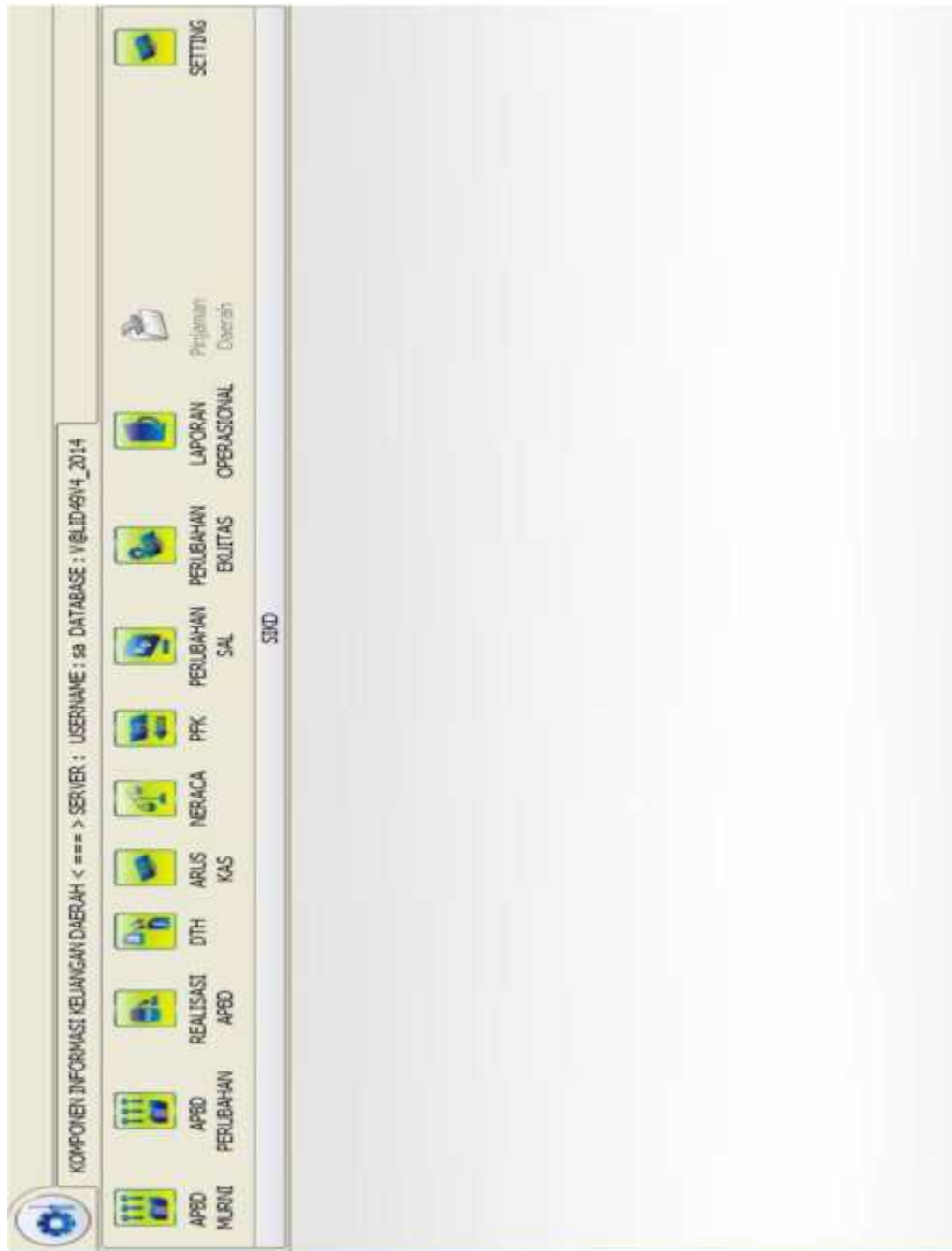
**Double klik pada aplikasi SIKD**

**Gambar 4.2 prosedur penggunaan awal SIKD**

Sebelum menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi agen SIKD, pengguna harus memastikan “Setting” dari agen SIPKD sesuai yang diperuntukannya, seperti pada gambar di bawah ini



**Gambar 4.3 Setting Data Pemda**

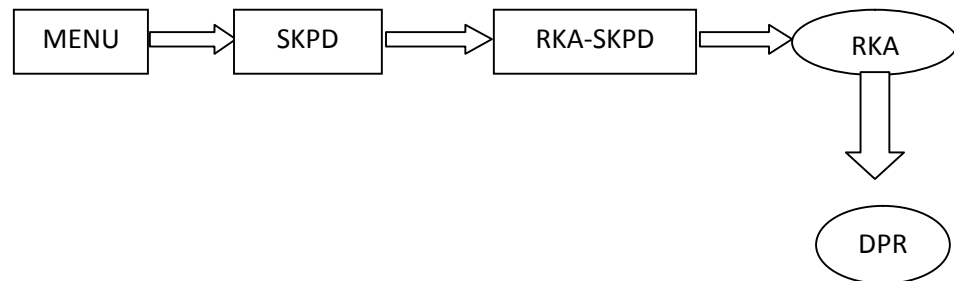


Gambar 4.4 Akun SIKD

Berikut adalah *flowchart* sederhana berkaitan dengan pengolahan data dengan menggunakan Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) :

a. Bagian Anggaran

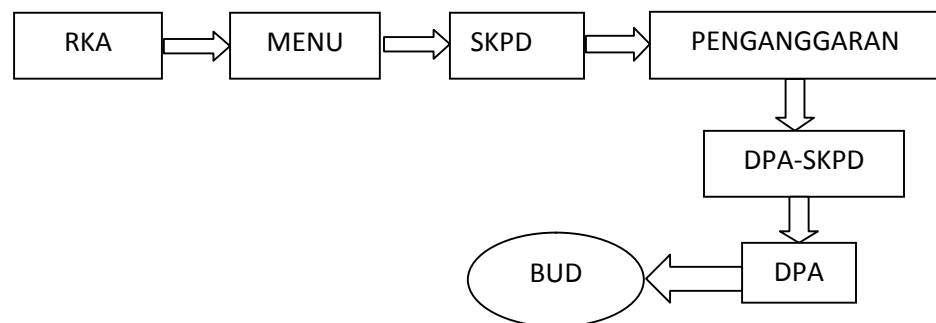
1) Rencana kerja anggaran (RKA)



**Gambar 4.5 Alur Rencana Kerja Anggaran (RKA)**

Dari gambar diatas dapat di deskripsikan bahwa alur dari rencana kerja anggaran (RKA) yaitu dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat rencana anggarannya, lalu masing-masing rencana anggaran (RKA) tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaporkan dan dibawa ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah daerah.

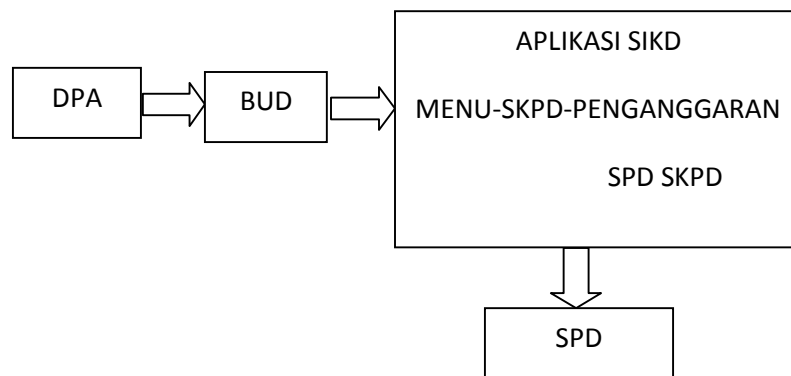
2) Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)



**Gambar 4.6 Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)**

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa proses pelaksanaan anggaran yaitu, dimulai dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, lalu menyampaikan rancangan dokumen pelaksana anggaran (DPA) ke bagian bendahara umum daerah ( BUD)

### 3) Surat penyediaan dana (SPD)



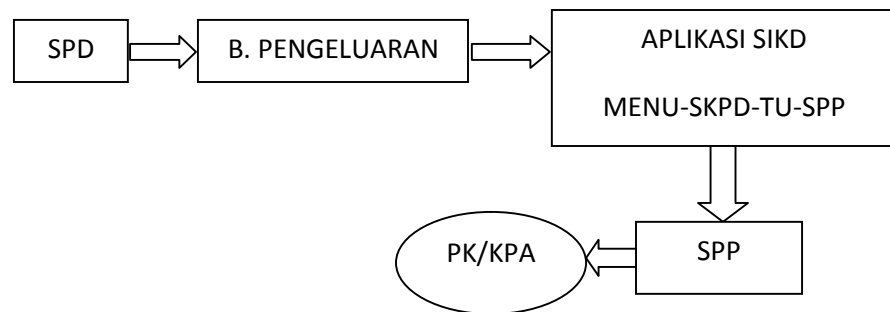
**Gambar 4.7 Alur Surat Penyediaan Dana (SPD)**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses dari surat penyediaan dana (SPD) yaitu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) menyampaikan rencana anggarannya kepada bendahara umum daerah (BUD), kemudian kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan DPA SKPD dan anggaran kas pemerintah daerah serta permintaan SPD dari SKPD. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi dan ditanda tangani oleh PPKD. Setelah pejabat pembuat komitmen daerah (PPKD) megotorisasi rancangan SPD, PPKD menyerahkan SPD kepada

pengguna anggaran. Kemudian SPD diterbitkan dalam rangkap dua, yakni dokumen pertama diserahkan kepada pengguna anggaran yang akan dipakai sebagai dasar dalam pembuatan SPP, kedua dokumen dibuat sebagai arsip oleh PPKD.

#### 4) Bagian penatausahaan

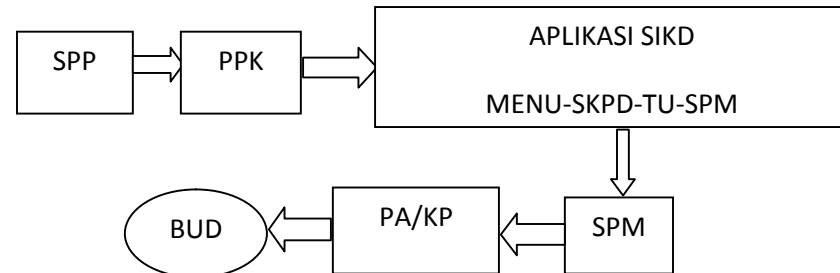
##### a.) Surat permintaan pembayaran (SPP)



**Gambar 4.5 Alur Surat Permintaan Pembayaran (SPP)**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses dari surat permintaan pembayaran (SPP) yaitu dokumen SPD kemudian akan diserahkan kepada bendahara umum daerah (BUD) kepada setiap SKPD untuk digunakan sebagai dasar pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP). Kepala SKPD kemudian akan menyerahkan dokumen SPD kepada bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD dalam rangka pembuatan dokumen SPP. SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran dan diajukan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) melalui pejabat pembuat komitmen (PPK-SKPD). Berdasarkan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, PPK-SKPD kemudian akan menguji dan memverifikasi SPP

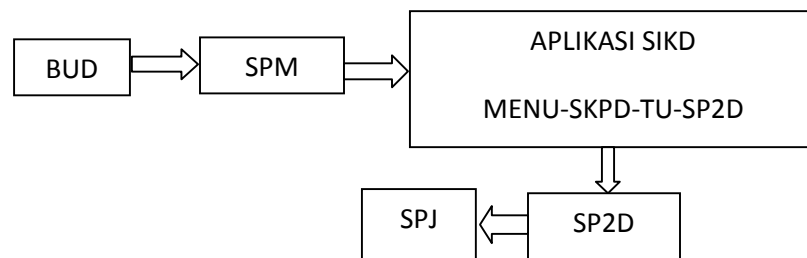
## b.) Surat perintah membayar (SPM)



**Gambar 4.9 Alur Surat Perintah Membayar (SPM)**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa alur dari surat perintah membayar (SPM) yaitu dimulai dari petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan menandatangani tanda terima SPP. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) lalu kemudian PPK penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP dengan cara memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP, setelah dilakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen maka PPK menerbitkan SPM. Setelah itu kemudian dibawa ke bendahara umum daerah (BUD).

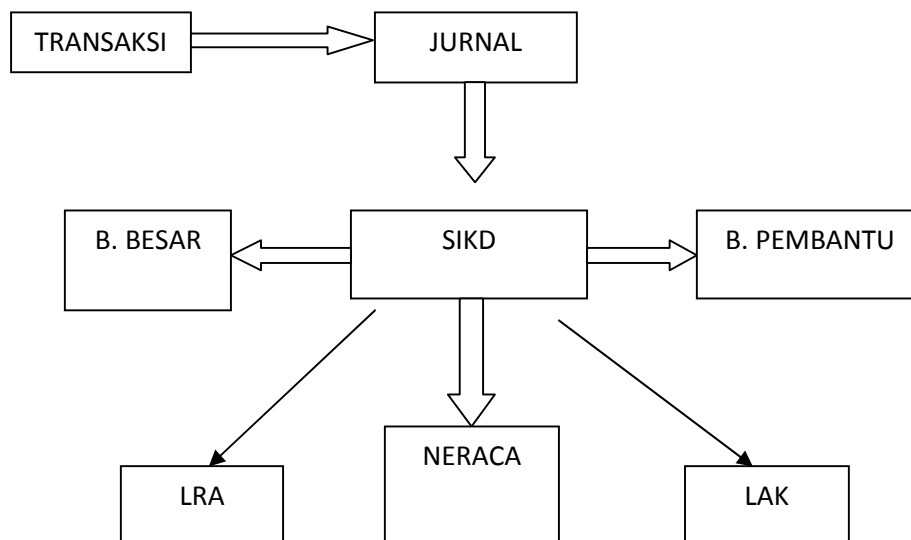
## c.) Surat perintah pencairan dana (SP2D)



### Gambar 4.10 Alur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa alur dari surat perintah pencairan dana (SP2D) yaitu dimulai dari bendahar umum daerah (BUD) melakukan audit atas kebenaran dan kelengkapan dari surat perintah membayar (SPM), jika BUD menyatakan bahwa dokumen itu sudah lengkap maka bendahara umum daerah (BUD) akan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang sudah di sah kan telah berhasil ditanda tangani dan distempel oleh BUD.

#### 5) Bidang akuntansi dan pelaporan



**Gambar 4.11 Alur Akuntansi dan Pelaporan**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa alur dari akuntansi dan pelaporan yaitu dimulai dari mencatat semua transaksi-transaksi yang telah terjadi, lalu kemudian dicatat ke dalam jurnal, didalam akuntansi pemerintah terdiri dari jurnal akrual dan jurnal kas. Setelah transaksksi



dicatat ke dalam jurnal tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi yaitu memposting kedalam buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Proses posting akan menghasilkan saldo-saldo akun besar. Sebelum laporan keuangan disusun, perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode terhadap transaksi. Dengan dijurnal penyesuaian maka pendapatan dan beban yang tersaji dalam laporan operasional benar-benar yang sudah menjadi hak dan kewajiban pemerintah. Setelah jurnal penyesuaian diposting, akan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo penyesuaian inilah laporan keuangan disusun.

## **2. Faktor-faktor yang menunjang Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Takalar**

### **a. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam sebuah perusahaan maupun instansi pemerintahan sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah dalam rangka menunjang kemampuan dan profesionalisme. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu menunjang kualitas informasi keuangan. Sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya tidak lepas dari kinerja sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya melalui bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang cukup memadai di bidang yang dia tekuni. Begitupun dalam hal para pengguna

Sistem Informasi Keuangan Daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus, dimana para pengguna harus dapat menjalankan atau menggunakan komputer.

Dalam proses optimalisasi penggunaan SIKD erat kaitannya dengan ketersediaan SDM dalam mendukung program aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, namun untuk menunjang optimalnya penggunaan sistem ini sumber daya manusia tidak akan bisa mengoptimalkan penggunaan SIKD tanpa adanya keahlian dan dibekali dengan berbagai pelatihan untuk mengelola sistem ini. Maka dari itu peneliti mengajukan pertanyaan dengan melakukan wawancara kepada ke tiga informan yaitu ibu Yulianti Mochtar (Staff Anggaran), bapak Lahamuddin (Kabid. Akuntansi & Pelaporan), dan juga kepada bapak Hairuddin (Kabid. Anggaran), Adapun hasil wawancaranya yaitu :  
Ibu Yulianti Mochtar mengatakan bahwa :

“Ehhh..sebenarnya iaa.. memang para pengguna SIKD itu harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi, dalam artian dia tidak hanya sebatas bisa menjalankan komputer saja. karena ini kan sistem dimana tidak semua orang bisa menjalankannya harus dia yang paham dan mengerti dengan sistem ini, dan terkait dengan pelatihan dalam hal pengelolaan SIKD itu, para staff atau pengguna SIKD itu selalu diikutkan berbagai pelatihan terkait SIKD, karena dari pelatihan itu kan disana mereka diajari tentang cara penggunaan SIKD dengan baik dan benar.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Yulianti Mochtar di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa pengguna SIKD itu harus memiliki keahlian khusus dalam hal penggunaan SIKD, tidak hanya berbekal pandai

dalam mengoperasikan komputer namun juga harus mengerti dan paham terkait sistem SIKD ini karena tidak semua orang yang bisa mengoperasikan komputer bisa menggunakan sistem SIKD ini. Pembekalan atau pemberian pelatihan bagi para pengguna SIKD juga sangat penting karena melalui pelatihan itu para pengguna diajarkan bagaimana menggunakan atau mengoperasikan sistem SIKD dengan baik dan benar.

Penjelasan dari Ibu Yulianti Mochtar diperkuat dengan penjelasan dari bapak Lahamuddin yang mengatakan bahwa :

“Sudah pasti harus memiliki keahlian khusus dalam hal komputer pastinya, Karena, kalau kita menggunakan aplikasi SIKD ini kita harus mengetahui bagaimana untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, untuk itu harus menggunakan keahlian khusus dibidang itu. Tidak semua orang yang bisa menjalankan komputer bisa menjalankan SIKD ini. Semua pengguna atau operator SIKD didalam mengoperasikan sistem ini. Dia harus sebelumnya...dia harus mengikuti pelatihann-pelatihan. Karena memang dari awal penggunaan sistem SIKD ini para pengguna sudah ikut dan melakukan pelatihan terkait sistem ini, dan 2 tahun lalu juga kami disini para pengguna SIKD kembali ikut pelatihan lagi terkait sistem ini, apakah itu pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pemerintah daerah sendiri, apakah itu pelatihan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat itu kita harus mengikuti pelatihannya. karena dari pelatihan itu dia bakal mengetahui apa yang sebelumnya dia belum mengerti terkait dari sistem tersebut.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Lahamuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Mei 2018 bahwa pengguna SIKD harus memiliki keahlian khusus dia tidak hanya berlandaskan pandai dalam hal mengoperasikan komputer namun dia juga harus pandai dan mengerti terkait dari SIKD ini. Pemberian pelatihan pada para pengguna SIKD sangat penting

untuk dilakukan karena dari pelatihan tersebut dia bisa mengetahui apa yang selama ini belum dia ketahui.

Sedangkan menurut bapak Hairuddin mengatakan bahwa :

“Iaa. Jadi dalam hal penggunaan sistem informasi keuangan daerah ini memang harus memiliki keahlian khusus. Jadi, mereka semua sebelumnya harus dilatih dan diberikan bekal untuk mengoperasikan sistem ini. Dan juga para pengguna SIKD di instansi ini juga dari awal penggunaan sistem sudah ikut melakukan berbagai pelatihan terkait sistem ini, jadi mereka sudah cukup tahu dan paham terkait sistem ini.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Hairuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa pengguna SIKD perlu memiliki keahlian khusus tidak hanya sekedar pandai dalam hal komputer saja, namun mereka juga harus dibekali dengan berbagai pelatihan dalam hal mengoperasikan sistem ini.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengguna SIKD tidak hanya sebatas seseorang bisa menjalankan atau mengoperasikan komputer, namun dalam hal ini dia juga paham dan mengerti terkait sistem ini karena tidak semua orang yang bisa menjalankan komputer bisa mengoperasikan sistem SIKD ini. Pemberian pelatihan dan pembekalan terkait pengoperasian SIKD juga sangat penting diikuti dan diberikan bagi para pengguna SIKD dan para pengguna sistem ini pada instansi ini bisa dikatakan sudah cukup paham terkait sistem karena memang dari awal adanya sistem sudah melakukan berbagai pelatihan terkait penggunaan SIKD ini, karena dari

sanalah para pengguna bisa lebih mengetahui dan lebih memahami lagi terkait sistem tersebut.

#### **b. Perangkat Komputer**

Sistem informasi merupakan salah satu hal paling penting dalam membantu perkembangan suatu organisasi. Sistem informasi keuangan daerah merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh suatu instansi pemerintahan untuk memberikan informasi terkait keuangan daerah kepada publik. Salah satu komponen utama sistem informasi dapat berjalan dengan baik adalah perangkat komputer.



**Gambar 4.12 Perangkat komputer**

Perangkat komputer sangat besar peranannya terhadap optimalnya penggunaan SIKD. maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu Ibu Yulianti Mochtar (Staff anggaran), bapak Lahamuddin (Kabid. Akuntansi & Pelaporan) dan juga bapak Hairuddin (Kabid. Anggaran).

Ibu Yulianti Mochtar mengatakan bahwa :

“Oh..Kalau mengenai perangkat-perangkat menurut saya sudah cukup baik yang telah disiapkan oleh instansi karena semua fasilitas perangkat sudah sangat layak digunakan oleh para pengguna dalam mendukung kerja sistem SIKD ini. Yach seperti komputer ini yang setiap staff yang memakai sitem itu disediakan satu komputer satu orang jadi kita tidak perlu lagi ganti-gantian menggunakan komputer karena sudah disiapkan masing-masing. Ini juga seperti tempat kerja ini. Setiap orang itu sudah diberikan meja masing-masing untuk bekerja, jadi kita disini itu bekerja ditempat yang telah disediakan.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Yulianti Mochtar di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa perangkat komputer yang telah disiapkan oleh instansi dapat dikatakan layak dipakai dan sudah cukup baik dalam menopang kerja pada sistem.

Penjelasan dari Ibu Yulianti Mochtar diperkuat dengan penjelasan dari bapak Lahamuddin yang mengatakan bahwa :

” Ahh... sampe saat ini semua perangkat komputer yang disiapkan oleh pemerintah daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan itu bisa dikatakan sudah cukup baik menopang kerja SIKD ini. Kalau ditanyakan terkait layak tidaknya digunakan itu, pastinya saya mengatakan sangat layak sekali digunakan dalam mendukung kerja pada sistem. Karena semua perangkat komputer yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah itu sudah bisa mengakses semua dengan baik sistem informasi keuangan daerah yang kita gunakan sekarang ini.”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Lahamuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2018 yaitu bahwa semua perangkat komputer yang disiapkan oleh pemerintah sudah cukup baik. Karena apa yang telah disiapkan oleh instansi khususnya di BPKD sudah cukup menopang kerja sistem.

Sedangkan menurut bapak Hairuddin mengatakan bahwa :

“Ohh ia pasti itu. Alhamdulillah pemerintah Takalar itu memberikan fasilitas yang sangat baik bagi para staff pegawai disini. Begitupun halnya perangkat komputer sudah cukup baik dan layak sekali digunakan para pengguna SIKD. Kebetulan di sini itu para pengguna SIKD sudah difasilitasi komputer setiap orangnya.”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Hairuddin diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa perangkat komputer yang telah disiapkan oleh instansi sudah cukup baik.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa semua perangkat komputer yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah khususnya pada instansi Badan pengelola keuangan daerah sudah cukup baik memberikan fasilitas pada perangkat komputer yang dibutuhkan terkait dalam hal kerja sistem SIKD, karena apa yang telah disiapkan oleh instansi sudah cukup menopang dengan baik kerja pada sistem tersebut.

### **c. Jaringan Internet**

Jaringan komputer (*interconnection networking*) adalah sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat komputer dari berbagai macam tipe atau jenis secara global dan terbuka. Perangkat jaringan sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar komputer.

Adapun manfaat jaringan internet menurut Haryanto, E.V. 2007. Yogyakarta. Yaitu:

- a) Jaringan internet memungkinkan seseorang untuk mengakses file yang dimilikinya atau file orang lain yang telah diizinkan untuk diakses dimanapun dan kapanpun
- b) Jaringan memungkinkan proses pengiriman data berlangsung cepat dan efisien
- c) Jaringan memungkinkan seseorang berhubungan dengan orang lain di berbagai negara dengan komunikasi melalui via teks, gambar, audio, dan video secara real-time.
- d) Jaringan internet dapat menekan biaya operasional seperti pemakaian kertas, pengiriman surat atau berkas, telepon, serta pembelian hardware.

**Tabel 4.2 Jaringan Internet**  
**Sumber : Staff BPKD Tahun : 2018**

No	Pengguna	Nama Jaringan
1	Umum	Telkomsel
2	SIKD	Ikon +

Jaringan internet adalah pemegang kendali dari proses kerja dari sistem SIKD dimana salah satu fungsi jaringan yaitu memungkinkan pengiriman data inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa jaringan internet itu menjadi salah satu penunjang optimal tidaknya penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu Ibu Yulianti Mochtar (Staff



anggaran), bapak Lahamuddin (Kabid. Akuntansi & Pelaporan) dan juga bapak Hairuddin (Kabid. Anggaran).

Ibu Yulianti Mochtar mengatakan bahwa :

”Ehhhh..Kalau soal jaringan internet itu bisa dikatakan sudah cukup baik tapi terkadang juga kita masih memiliki hambatan sedikit pada jaringan yang secara otomatis juga menghambat kerja kita. Jadi tergantung dari jaringan kalau jaringannya lagi bagus yach lancar, tapi kalau lagi jelek yach begitu kita terhambat lagi dalam penginputan. Tapi alhamdulillahnya jaringan itu kalau bermasalah tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Yulianti Mochtar di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa jaringan internet sudah bisa dikatakan sudah cukup baik dalam mendukung proses penginputan pada SIKD, namun terkadang juga mengalami gangguan yang membuat terhambatnya proses penginputan, namun hal itu tidak terlalu lama untuk bisa kembali normal lagi.

Penjelasan dari Ibu Yulianti Mochtar diperkuat dengan penjelasan dari bapak Lahamuddin yang mengatakan bahwa :

”Ahh.. Sampai saat ini alhamdulillah jaringan sangat mendukung sekali dan cukup baik dalam mengakses. Namun terkadang juga ada masalah, tidak selamanya bagus jaringan karena jaringan itu bukan yang nyata yang kita lihat yang bisa kita perbaiki seperti perangkat komputer. Ini persoalan jaringan seperti ini terkadang juga lambat, namun hal itu tidak terlalu lama dan kita sebagai pengguna bisa melanjutkan kembali proses penginputan. Jadi kalau ditanya soal apakah jaringan sudah cukup baik mendukung proses kerja SIKD pasti tentunya iaaa..”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Lahamuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Mei 2018 bahwa jaringan internet sudah cukup baik

mendukung proses penginputan pada SIKD, walaupun ada sedikit kendala namun tidak terlalu berpengaruh pada pengguna karena situasi jaringan yang cepat kembali normal lagi.

Sedangkan menurut bapak Hairuddin mengatakan bahwa :

“Yachh..sampe sekarang alhamdulillah jaringan itu sudah sangat bagus khususnya bagi para pengguna SIKD dalam melakukan penginputan. Walaupun terkadang jaringan ini pasti ada aja masalahnya. Apalagi kalau yang menggunakan itu sudah melebihi kapasitas penggunaannya itu terkadang cukup lambat dalam mengakses sistem SIKD ini.”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Hairuddin diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa jaringan internet dapat dikatakan sudah cukup baik dalam mendukung proses kerja SIKD, walaupun terkadang lambat namun tidak terlalu menghambat proses kerja pada SIKD.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa jaringan internet pada instansi Badan pengelola keuangan daerah Takalar khususnya pada penggunaan SIKD dapat dikatakan sudah cukup baik dalam mendukung optimalnya penggunaan SIKD, walaupun terkadang terjadi kelambatan dalam hal mengakses namun tidak terlalu berpengaruh karena hal tersebut tidak terlalu lama terjadi dan bisa kembali normal lagi.

#### **d. Keamanan Sistem**

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi, walau terkadang masih seringkali kurang

mendapat perhatian bagi para pengguna dan pengelola sistem informasi. Informasi masih saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting, kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah lembaga pemerintahan. Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu.



**Gambar 4.10 Bentuk Penggunaan Password**

Keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Ancaman paling signifikan terhadap keamanan dari sistem komputer pada saat ini bukan berupa ancaman terhadap keamanan fisik, tetapi juga non fisik, yaitu *intruders*, biasa dikenal

dengan “*Hacker/crackers*”. Salah satu bentuk keaman sistem yaitu menerapkan penggunaan *password* bagi setiap pengguna sistem, *password* akan dirahasiakan bagi mereka yang tidak diijinkan untuk mengakses. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu Ibu Yulianti Mochtar (Staff anggaran), bapak Lahamuddin (Kabid. Akuntansi & Pelaporan) dan juga bapak Hairuddin (Kabid. Anggaran).

Ibu Yulianti Mochtar mengatakan bahwa :

“Ia.. Setiap pengguna sistem mempunyai password tersendiri. masing-masing kan ada bagian-bagian yang telah ditentukan untuk dia input atau kerjakan disistem itu. Jadi kan biasanya juga ada yang komputernya bermasalah dan dia ingin menginput sesuatu, jadi biasanya dia pake komputer lain lagi, jadi supaya data-datanya itu aman setiap pengguna itu memang diwajibkan untuk memiliki password tersendiri.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Yulianti Mochtar di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa setiap pengguna atau pemakai SIKD masing-masing mempunyai password tersendiri untuk mengakses sistem, agar data-data yang ada pada sistem tetap aman.

Penjelasan dari Ibu Yulianti Mochtar diperkuat dengan penjelasan dari bapak Lahamuddin yang mengatakan bahwa :

“Semua pengguna SIKD itu memiliki password tersendiri. Dalam artian para pengguna SIKD atau yang menginput data pada SIKD itu mempunyai password tersendiri untuk membuka sistem, Karena dia yang punya tanggung jawab, ..misalnya dibidang anggaran, dia yang menginput terkait semua tentang anggaran itu harus punya password tersendiri tentang masalah penginputan anggaran. Nah, dia tidak bisa sembarang orang yang menginput. Artinya kalau orang

anggaran harus orang anggaran yang bertanggung jawab, kalau dibidang akuntansi itu masalah pencairan tidak mungkin orang anggaran yang akan mencairkan atau memproses pencairan. Makanya dia harus memiliki password tersendiri dalam hal sistem ini. Dan yang palingsa penting dari diterapkannya penggunaan password bagi setiap pengguna sistem agar keamanan data-data itu tetap terjaga, namun selain dari pengguna itu sendiri yang mengetahui passwordnya ada pihak lain juga yang harus tahu karena misalkan dia terkendala datang maka pihak yang mengetahui paswordnya itu bisa membantu dulu dalam menginput data.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Lahamuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Mei 2018 bahwa setiap pengguna atau pemakai SIKD itu memiliki password tersendiri untuk mengakses sistem, karena setiap pemakai tanggung jawabnya itu berbeda, jadi salah satu arternatif agar data-data para pemakai SIKD itu aman maka setiap pengguna SIKD itu wajib memiliki *password* tersendiri untuk membuka sistem. Namun selain dari pengguna ini ada satu pihak juga yang mengetahui password tersebut agar nantinya ketika ada hambatan ada yang bisa turut membantu dalam penginputan data.

Sedangkan menurut bapak Hairuddin mengatakan bahwa :

“Iaa pasti itu. Jadi ada level-level tertentu dalam hal penggunaan sistem ini. Jadi setiap user atau pengguna SIKD itu memiliki masing-masing password untuk membuka sistem. Kenapa? Karena setiap pengguna kan tugasnya beda-beda jadi untuk meminimalisir agar kesalahan kerja untuk para pengguna itu dengan diterapkannya pengguna password untuk masing-masing pengguna sistem.” Dan juga terkait keamanan eksternalnya itu kita diinstansi ini setiap ruangnya sudah memiliki masing-masing cctv agar keamanannya itu lebih ketat lagi..

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Hairuddin diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa para pengguna SIKD itu masing-masing memiliki *password* tersendiri untuk membuka sistem, karena dengan diberlakukannya atau diterapkannya penggunaan password bagi para pengguna SIKD maka dapat meminimalisir kesalahan kerja yang mungkin bisa saja terjadi bagi para pengguna SIKD. Selain dari keamanan internalnya, keamanan eksternal dari sistem ini juga perlu yaitu dengan diberikannya cctv pada tiap ruangan.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada Instansi pemerintahan khususnya pada Badan pengelola keuangan daerah Takalar terkait pada pengguna SIKD itu para pengguna atau pemakai sistem sudah memiliki masing-masing *password* tersendiri untuk membuka sistem dan password tersebut juga diketahui oleh pihak terpercaya yang bisa membantu pengguna untuk menginput data apabila pengguna tersebut sedang sibuk atau tidak datang, karena dengan adanya penggunaan password ini bagi para pengguna maka dapat mencegah hal-hal buruk yang mungkin saja dapat terjadi pada sistem SIKD. Misalnya, dengan diterapkannya penggunaan *password* bagi setiap pengguna SIKD maka dapat meminimalisir kesalahan kerja yang mungkin bisa saja terjadi pada kalangan para pengguna, dan juga yang paling sangat penting dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *password* yaitu terkait keamanan data-data yang ada pada sistem SIKD

tersebut. Selain dari keamanan internal keamanan eksternal juga sangat penting, jadi diinstansi tersebut tiap ruangnya sudah dipasangkan *closed circuit television (cctv)*.

**e. Akses Informasi**

Setiap badan publik mempunyaikewajiban untuk membuka akses atas informasi yang berkaitan dengan masyarakat yang luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) / anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat.

Sesuai dengan yang diamanat dalam pasal 13 UU No.14 Tahun 2008 setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Keberadaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi

2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu.
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

**Tabel 4.3 Jalur akses melihat hasil data keuangan daerah**

**Sumber : Staff BPKD Tahun : 2018**

No	Pengguna	Jalur akses
1	Pengguna SIKD	Sistem SIKD
2	Publik	Portal Takalar ( <a href="http://www.takalarkab.go.id">http://www.takalarkab.go.id</a> )

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses informasi terhadap publik, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu Ibu Yulianti Mochtar (Staff anggaran), bapak Lahamuddin (Kabid. Akuntansi & Pelaporan) dan juga bapak Hairuddin (Kabid. Anggaran).



Ibu Yulianti Mochtar mengatakan bahwa :

“Semua orang boleh mengakses informasi keuangan ini. Karena memang tujuan dari dibuatnya sistem ini itu supaya pemerintah lebih transparansi lagi terkait pengelolaan keuangan daerah. Tapi dia hanya bisa sebatas melihat saja tidak mempunyai hak untuk mengubah atau apapun itu. Intinya Cuma sebatas melihat saja.

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Yulianti Mochtar di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa akses informasi keuangan daerah yang disajikan oleh pemerintah dapat diakses oleh semua kalangan, namun dalam hal ini masyarakat atau publik hanya sekedar cukup melihat saja informasi keuangan yang disajikan tanpa bisa mengubah atau apapun itu.

Penjelasan dari Ibu Yulianti Mochtar diperkuat dengan penjelasan dari bapak Lahamuddin yang mengatakan bahwa :

“Kalau persoalan informasi semua lapisan masyarakat , semua publik bisa mengakses. Tetapi dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa melihat dari sisi laporan hasil keuangan daerah. Dia tidak bisa merubah, manambah dan mengurangi. Artinya dia sebatas hanya bisa melihat saja.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Lahamuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Mei 2018 bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi keuangan daerah, namun tidak lebih dari itu, dalam artian masyarakat cukup hanya bisa melihat hasil informasi keuangan yang telah di sajikan tanpa memiliki wewenang untuk merubah data-data yang sudah ada.

Sedangkan menurut bapak Hairuddin mengatakan bahwa :

“Sebenarnya dari segi sisi penganggaran itu semua bisa mengakses, tapi kan dalam hal penginputan, dalam hal pergantian-pergantian data itu harus orang-orang terkait atau para pengguna SIKD yang boleh melakukannya. Jadi untuk ke publik itu mereka hanya sebatas mengamati dan melihat saja tanpa memiliki wewenang untuk mengubah ataupun mengganti data tersebut. Karena yang memiliki wewenang itu hanya orang-orang disini yaitu para pemakai SIKD”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Hairuddin diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa semua bisa mengakses, namun tidak dapat mengubah ataupun mengganti data-data yang telah disajikan karena yang mempunyai wewenang untuk mengubah yaitu hanya bagi para pengguna SIKD saja. Jadi untuk publik dia hanya sekedar melihat saja hasil informasi keuangan daerah yang telah disajikan oleh pemerintah terkait.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa semua kalangan atau lapisan masyarakat sangat bebas untuk bisa mengakses informasi kuangan daerah yang telah disajikan dan diposting oleh pemerintah terkait, karena memang tujuan dari diterapkannya penggunaan SIKD yaitu agar pemerintah lebih transparansi lagi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Namun, kalangan masyarakat luas hanya cukup bisa melihat hasil dari informasi keuangan saja tanpa memiliki wewenang untuk mengubah, menambah, ataupun mengurangi data informasi tersebut. Karena yang bisa melakukan hal tersebut yaitu hanya para pengguna dan pemakai SIKD saja yang bisa melakukannya.

#### f. Efisiensi Waktu

Berbicara terkait sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang telah digunakan dan dipakai oleh pemerintah Takalar khususnya pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) untuk membantu bagi para staff dalam hal mengelola keuangan daerah, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membuat proses kerja menjadi lebih cepat. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu Ibu Yulianti Mochtar (Staff anggaran), bapak Lahamuddin (Kabid. Akuntansi & Pelaporan) dan juga bapak Hairuddin (Kabid. Anggaran).

Ibu Yulianti Mochtar mengatakan bahwa :

“Ia, kalau berbicara terkait efisiensi waktu itu ia sangat menghemat waktu sekali karena SIKD itu kan didalamnya sudah disiapkan bagian-bagiannya jadi tinggal kita langsung masukkan saja datanya, Kita tidak perlu repot-repot lagi mencatat panjang lebar. Sistem ini itu sangat mempermudah dan membuat kita sebagai para pengguna itu sangat bisa lebih mudah dan cepat lagi dalam bekerja , karena setiap ada data yang mau diinput itu kita hanya langsung buka sistem dan memasukkan data sesuai dengan format yang telah disiapkan didalamnya.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Yulianti Mochtar di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa dengan adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) ini sangat mengefesienkan waktu sekali bagi para pengguna sistem, karena dengan adanya sistem ini sangat memudahkan dan mempercepat dalam hal penginputan data-data terkait keuangan daerah.

Penjelasan dari Ibu Yulianti Mochtar diperkuat dengan penjelasan dari bapak Lahamuddin yang mengatakan bahwa :

“Sangattt..sangat mengefisienkan waktu. Karena kenapa dikatakan seperti itu, karena ahh..salah satu contoh pada saat permintaan pembayaran ditempat kami seorang tim verifikasi itu harus menyetujui apakah permintaan ini sudah benar atau belum, nah pada saat tim verifikasi ini lagi diluar daerah dia bisa mengakses dimanapun lewat aplikasi atau sistem ini dimana saja, dia bisa men OK kan permintaanya dengan melihat di sistem itu terkait surat pembayaran. Nah..seperti itu.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Lahamuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Mei 2018 bahwa dengan adanya sistem ini sangat mengefisienkan waktu dan mempermudah sekali bagi para staff pegawai pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD), Karena sistem ini membuat para penggunanya bisa bekerja dimana saja dan kapan saja, asalkan jaringan komputer mendukung maka proses penginputan data dapat dilakukan kapan saja.

Sedangkan menurut bapak Hairuddin mengatakan bahwa :

“Iaa..ini sangat membantu menghemat waktu, karena sistemnya sudah ada tinggal langsung menginput data-data tertentu sehingga tidak lagi..misalnya dalam hal struktur-struktur penganggaran itu sudah tertata didalam sistem jadi tinggal langsung diinput masuk data terkait saja. Jadi dengan adanya sistem ini itu sangat-sangat mengefisienkan waktu sekali. Kemudian dimana saja kapan saja kalau dalam hal penganggara itu bisa melakukan penginputan. Karena sistem ini itu waktunya tidak terbatas dalam hal penginputan.”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Hairuddin diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 Mei 2018

bahwa dengan adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) ini sangat mengefesienkan waktu bagi para pekerja, karena sistem ini itu didalamnya sudah tertata format-format pengisian data-data yang diinginkan, jadi sangat mempermudah sekali bagi para pengguna saat menginput data keuangan kedalam sistem. Selain itu juga sistem ini memudahkan bagi para pengguna untuk bisa bekerja dimanapun dan kapanpun itu.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam hal penginputan data-data keuangan instansi pemerintahan sangat mengefesienkan waktu sekali bagi para pekerja dalam menginput data-data terkait keuangan, karena sistem ini sudah menyiapkan berbagai format pengisian data sesuai yang akan diinput. Selain itu juga sistem ini memudahkan para pengguna untuk bekerja dimanapun dan kapanpun itu, asalkan terhubung dengan jaringan maka proses penginputan data dapat dilakukan.

**g. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi (instansi pemerintah) secara keseluruhan.

SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain (Permenpan No. PER/21/M-PAN/11/2008) :

- 1.) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
- 2.) SOP membantu staff menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan sehari-hari.
- 3.) Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas
- 4.) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan
- 5.) Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.
- 6.) Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.
- 7.) Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari
- 8.) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan

9.) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.

Dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam bekerja, Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu Ibu Yulianti Mochtar (Staff anggaran), bapak Lahamuddin (Kabid. Akuntansi & Pelaporan) dan juga bapak Hairuddin (Kabid. Anggaran).

Ibu Yulianti Mochtar mengatakan bahwa :

“Ia. Kita disini itu bekerja dengan berlandaskan pada SOP dan juga peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan terkait SIKD ini. Karena kedua hal itu adalah acuan utama kami dalam bekerja menggunakan sistem ini.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Yulianti Mochtar di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa yang menjadi hal utama atau acuan para pengguna SIKD dalam bekerja menggunakan sistem yaitu dengan berlandaskan pada SOP dan juga peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Penjelasan dari Ibu Yulianti Mochtar diperkuat dengan penjelasan dari bapak Lahamuddin yang mengatakan bahwa :

“Sudah sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah terkait SIKD yang telah disampaikan oleh menteri keuangan itu sudah sesuai dengan yang kita laksanakan disini. Karena memang yang menjadi pedoman para pengguna atau pemakai sistem informasi

keuangan daerah (SIKD) di Badan pengelola keuangan daerah ini yaitu SOP dan juga peraturan menteri keuangan.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Lahamuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Mei 2018 bahwa standarisasi dan pedoman para pengguna atau pemakai sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) yaitu dengan berlandaskan pada SOP yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan juga peraturan menteri keuangan terkait SIKD.

Sedangkan menurut bapak Hairuddin mengatakan bahwa :

“Iaa..kami disini sebagai pengguna dan pemakai SIKD itu dalam bekerja sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk sementara ini kami dari sistem informasi keuangan daerah Pemerintahan Takalar ini sudah diakui. Jadi semua kan..semua laporan-laporan keuangan itu link kepada pemerintah pusat. Jadi Alhamdulillah kabupaten Takalar setiap laporan-laporannya itu sudah semuanya link terhdap pemerintah pusat. Kita disini itu dalam hal penggunaan SIKD ini itu slalu berpedoman pada peraturan pemerintah terkait dalam hal penggunaan SIKD ini”

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Hairuddin diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa yang menjadi pedoman utama para pemakai atau pengguna sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yaitu dengan berlandaskan pada SOP dan juga peraturan-peraturan menteri keuangan terkait SIKD.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa para pengguna atau pemakai sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada pemerintahan Takalar khususnya di Badan pengelola



keuangan daerah (BPKD) dalam menggunakan atau menjalankan sistem selalu mengaju pada SOP dan juga peraturan pemerintah.

### **3. Upaya-upaya dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD**

Pada pemerintahan kabupaten Takalar khususnya pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) dalam hal penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung optimalnya penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada ketiga informan yaitu Ibu Yulianti Mochtar (Staff anggaran), bapak Lahamuddin (Kabid. Akuntansi & Pelaporan) dan juga bapak Hairuddin (Kabid. Anggaran).

Ibu Yulianti Mochtar mengatakan bahwa :

“Ehhhhh..setiap adaa apa yach..hampir setiap tahun kan ada perubahan terkait sistem, jadi supaya lebih optimal itu kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh ibu Yulianti Mochtar di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2018 bahwa salah satu upaya agar penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dapat lebih optimal lagi yaitu dengan selalu ikut menyesuaikan perubahan-perubahan pada sistem yang terjadi tiap tahunnya.

Penjelasan dari Ibu Yulianti Mochtar diperkuat dengan penjelasan dari bapak Lahamuddin yang mengatakan bahwa :

“Nah.. masalah upaya-upaya ehh.. yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah ini hanya sebatas bagaimana terkait

jaringan itu bisa lebih optimal lagi dalam artian jaringan tidak menghambat lagi dalam hal pekerjaan terkait SIKD ini karena salah satu penunjang optimalnya penggunaan SIKD yaitu soal jaringan. Jadi, disini kita perlu lagi bagaimana caranya agar jaringan tidak lagi menjadi penghambat pada sistem ini. Ahh.. mungkin seperti itu.”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Lahamuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Mei 2018 bahwa untuk membuat penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dapat lebih optimal lagi yaitu dengan dilakukannya perbaikan sistem jaringan, karena salah satu penunjang utama SIKD yaitu faktor jaringan. Jadi, agar penggunaan SIKD dapat lebih optimal lagi yaitu dengan cara pengoptimalan kinerja jaringan.

Sedangkan menurut bapak Hairuddin mengatakan bahwa :

Dalam hal mengoptimalkan penggunaan sistem ini, kami disini selalu membekali dan melatih para operator-operator atau pengguna sistem SIKD ini untuk lebih mendalami lagi kerja sistem tersebut. Jadi, jika dia mengalami masalah terkait sistem dia lebih mudah untuk menyelesaikannya.

Makna dari keterangan yang diberikan oleh bapak Hairuddin diatas dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 Mei 2018 bahwa salah satu langkah agar penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dapat lebih optimal lagi adalah dengan cara membekali dan melatih para operator-operator atau pengguna SIKD agar dapat lebih mengetahui lagi secara lebih mendalam terkait sistem tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan pada pemerintahan kabupaten Takalar khususnya pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) untuk lebih mengoptimalkan lagi penggunaan pada sistem yaitu dengan cara pengguna

atau pemakai SIKD harus dapat menyesuaikan setiap perubahan yang terjadi pada sistem tiap tahunnya, selain itu salah satu penunjang optimalnya penggunaan SIKD yaitu perbaikan sistem jaringan, agar jaringan tidak lagi menjadi salah satu penghambat kerja pada sistem. Dan juga pemberian bekal dan pelatihan terhadap para pengguna atau pemakai sistem agar lebih mengetahui lagi secara mendalam mengenai sistem SIKD adalah salah satu upaya agar penggunaan SIKD dapat lebih optimal lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten Takalar.

1. Faktor –faktor pendukung yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Takalar Khususnya pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) untuk menerapkan optimalnya penggunaan SIKD yaitu :

a.) Sumber daya manusia, untuk optimal tidaknya penggunaan SIKD sangat didukung oleh sumber daya manusia dimana dalam hal ini para pengguna SIKD. Pada instansi BPKD para pengguna atau pemakai sistem memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi, dalam artian dia tidak hanya pandai dalam hal mengoperasikan komputer namun dia juga paham terkait sistem SIKD ini. Selain itu juga para pengguna selalu dibekali dan diberikan pelatihan terkait sistem informasi keuangan daerah (SIKD) INI.

b.) Perangkat komputer, Salah satu hal pokok dari sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yaitu kelengkapan fasilitas komputer yang mendukung kerja pada sistem, dan pada instansi BPKD sudah memberikan dan memfasilitasi para pengguna sistem agar dapat bekerja dan menggunakan sistem SIKD dengan baik.

- c.) Jaringan Internet, Hal pokok dari dapat atau tidaknya sistem berjalan dengan baik tergantung dari keadaan jaringan yang memadai. Namun pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) sudah cukup memberikan pelayanan jaringan yang baik, walaupun terkadang terjadi kelambatan pada jaringan namun itu tidak terlalu menjadi masalah besar dan menghambat proses input pada sistem, karena hal tersebut tidak terlalu berlangsung cukup lama.
- d.) Keamanan sistem. Terkait keamanan pada sistem pihak dari BPKD sudah menerapkan kewajiban penggunaan password bagi masing-masing pengguna sistem agar bisa meminimalisir kehilangan maupun kerusakan pada data-data yang terdapat pada sistem tersebut
- e.) Akses informasi, dalam hal sistem informasi keuangan daerah (SIKD) siapapun dapat mengakses dan melihat hasil dari kegiatan keuangan daerah, namun dalam hal ini publik hanya sebatas dapat melihat saja tanpa memiliki wewenang untuk mengubah data-data yang sudah ada pada sistem kecuali pihak pengguna sistem yang melakukan hal tersebut.
- f.) Efisiensi waktu, dengan adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) para staff yang terlibat dalam pelaporan keuangan daerah khususnya pada BPKD mengatakan bahwa dengan adanya sistem ini sangat mengefisienkan waktu dalam hal penginputan data-data terkait keuangan daerah, Karena para staff tinggal langsung membuka sistem dan menginput data sesuai format yang telah disiapkan oleh sistem.

g.) *Standar operasional prosedur (SOP)*, pada pemerintahan kabupaten Takalar dalam hal penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) selalu mengacu pada SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga aturan yang dibuat oleh menteri keuangan.

2. Upaya-upaya dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Takalar khususnya pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD yaitu :

- a.) Selalu menyesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan pada sistem SIKD
- b.) Memberikan pelayanan jaringan yang optimal dalam mendukung proses kerja pada SIKD
- c.) Melatih dan membekali para pengguna sistem SIKD agar lebih mengetahui secara lebih jelas lagi terkait sistem informasi keuangan daerah (SIKD)

**B. Saran**

Dari hasil kesimpulan, penulis memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat dan menjadi cerminan dalam peneliti selanjutnya mengenai optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada pemerintahan kabupaten Takalar ( Studi kasus pada BPKD). Saran yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk lebih mengoptimalkan lagi penggunaan pada sistem informasi keuangan daerah (SIKD) diharapkan Pemerintahan kabupaten TakalaR

khususnya pada Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) pemberian kapasitas jaringan dapat di perbaiki lagi atau memperbesar jangkauan kapasitas jaringan lagi agar tidak terjadi kelambatan pada saat pengiputan data-data ke dalam sistem.

2. Peneliti ini belum komprehensif, karena hanya melihat kinerja dari segi penekatan proses, maka untuk kebutuhan peneliti berikutnya bagi yang berminat meneliti tentang optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) agar kiranya lebih mendapatkan informasi yang lebih efektif atau dapat dikembangkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, M.A., Herawati, N.T., dan Atmaja, A.T. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Program S1*. Vol. 2, No.1 (diakses 20 November 2017).
- Fauzi., R.A. 2017. Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi). Deepublish :Yogyakarta.
- Haryanto., E.V. 2012. Jaringan Komputer. Andi. Yogyakarta
- <http://bellaalqoriana201266112.weblog.esaunggul.ac.id/2013/07/16/peran-hardware-software-dan-internet/>
- <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bistream/handle/123456789/7463/Bab%202.pdf?sequence=10>
- <http://sayadewipitaloka.blogspot.com/2009/12/sistem-keamanan-dengan-menggunakan.html?m=1>
- Imran, M., Darwanis., dan Arfan, M. 2014. Pengaruh Kemudahan Penggunaan Sistem, Kemanfaatan Sistem Dan Keahlian Komputer Terhadap Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3, No.4 (diakses 20 November 2017).
- Iriani, S., Suyanto, M., dan Amborowati, A. 2014. Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Web Kabupaten Pacitan Dengan Menggunakan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut). *Indonesian Journal On Networking And Security*. Vol. 3, No.2 (diakses 25 November 2017).
- Muslihudin, M. dan Oktafianto. 2016. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Dalam Rangka Mendukung Percepatan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Pirade, D., Saleh, A.K., dan Amar, M.Y. 2013. Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai Tana Toraja (diakses 20 November 2017).

Primasari, D. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10, No. 1 (diakses pada 20 November 2017).

Rachim, AF.A . 2015. *Barometer Keuangan Negara*. Andi: Yogyakarta.

Sayekti, F., dan Putarta, P. 2016. Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. Vol. 9, No.3 (diakses 26 November 2017).

Wartini, N.N dan Murjana Yasa, I.G.W. 2016. Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintahan Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. (Diakses 24 November 2017)

[www.wikiapbn.org/sistem-informasi-keuangan-daerah/](http://www.wikiapbn.org/sistem-informasi-keuangan-daerah/)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

Lampiran 1 : Dokumentasi

“Kegiatan wawancara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
(BPKD) KABUPATEN TAKALAR”







## Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

### Lampiran Pedoman Wawancara

#### 3. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

Pendidikan :

#### 4. Pertanyaan Wawancara

- a. apakah pengguna sistem informasi keuangan daerah (SIKD) harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi informasi?
- b. Apakah pengguna SIKD tersebut dibekali dengan berbagai pelatihan untuk mengelola data pada SIKD?
- c. Apakah semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh instansi terkait sudah layak dan cukup menopang dengan baik cara SIKD?
- d. Apakah tidak ada kendala jaringan internet pada penggunaan SIKD?
- e. Bagaimana dengan keamanan sistem apakah setiap pengguna SIKD memiliki password untuk membuka sistem?
- f. Bagaimana dengan akses informasi siapa saja yang boleh mengakses informasi SIKD?
- g. Apakah dengan adanya SIKD dapat mengefisienkan waktu dalam penyusunan keuangan daerah?
- h. Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?

- i. Upaya apa saja yang dilakukan instansi dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD agar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan pemerintah?
- j. Apakah dengan dilakukannya upaya tersebut penggunaan SIKD sudah berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?

Lampiran 3 : Kebijakan Akuntansi



**PERATURAN BUPATI TAKALAR**  
**NOMOR 09 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN TAKALAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,



perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Takalar dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, perlu ditetapkan dalam suatu kebijakan akuntansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Takalar.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang/Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN TAKALAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Takalar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten Takalar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten Takalar.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda).
7. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
8. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Takalar adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kabupaten Takalar.
9. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Takalar.
10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya
11. Entitas pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Takalar yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum.
12. Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah Kabupaten Takalar yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan

laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Takalar selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Takalar selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

(1) Tujuan kebijakan akuntansi adalah:

- a. memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan
- b. memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Kabupaten Takalar.

(2) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Takalar.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup kebijakan akuntansi ini, terdiri atas:

- a. Kebijakan Akuntansi Penyajian Pelaporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Kebijakan Akuntansi Akun-akun, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan, serta Akuntansi Transitoris sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kabupaten Takalar menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Takalar.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Takalar atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan



**BAB IV****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 5**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Takalar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal ... Februari  
2016

**BUPATI TAKALAR,**

**BURHANUDDIN  
BAHARUDDIN**

## Lampiran 4 : Transkrip Wawancara

**Transkrip wawancara tanggal 15 Mei 2018 antara pewawancara dengan informan**

## Identitas informan

Nama : Yulianti Mochtar

Jabatan : Staff Anggaran

Pendidikan : S2 Akuntansi

Pewawancara	Hasil Wawancara
R	Assalamu alaikum wr wb..BU
Y	Walaikum salam.. ada apa ?
R	Maaf mengganggu sebelumnya bu, ini saya yang minggu lalu sudah ajukan surat buat penelitian dikantor ini bu, dan alhamdulillah surat saya direspon dengan baik oleh bapak kepala BPKD dan sudah diberikan izin buat meneliti disini. Maksud dan tujuan saya ini bu untuk melakukan wawancara ke ibu terkait judul penelitian saya bu
Y	Oh iye, kalau boleh tau apa judulta ?
R	Ohh judulku bu yaitu "Optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Takalar ( Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah)
Y	Oh iye. Jadi yang mau diwawancarai itu yang bagian apa ?
R	Yang saya mau wawancarai itu bu, yang menggunakan sistem informasi keuangan daerah
Y	Oh iye, berarti cocok mhe karna kebetulan saya staff anggaran disini yang memakai sistem ini untuk penginputan
R	Oh iye bu. Kalau boleh tau bu, apa sekarang ibu ada waktu buat saya lakukan wawancara ?
Y	Oh iye silahkan..
R	Makasih bu sebelumnya. Bisa say mulai sekarang ?

Y	Iye..
R	Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi informasi ?
Y	“Ehhh..sebenarnya iaa.. memang para pengguna SIKD itu harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi, dalam artian dia tidak hanya sebatas bisa menjalankan komputer saja. karena ini kan sistem dimana tidak semua orang bisa menjalankannya harus dia yang paham dan mengerti dengan sistem ini, dan terkait dengan pelatihan dalam hal pengelolaan SIKD itu, para staff atau pengguna SIKD itu selalu diikutkan berbagai pelatihan terkait SIKD, karena dari pelatihan itu kan disana mereka diajari tentang cara penggunaan SIKD dengan baik dan benar.
R	Apakah pengguna SIKD dibekali dengan berbagai pelatihan untuk mengelola data pada SIKD?
Y	Iya, memang para staff disini itu selalu diikutkan pelatihan dalam hal SIKD ini
R	Bu apakah memang perlu para staff yang menggunakan sistem ini ikut pelatihan ?
Y	Ia perlu sekali, Karena di pelatihan itu kan disana kita diajari bagaimana cara kerja terkait sistem ini.
R	Ohh iye bu, berarti wajib sekali bagi para pengguna ikut pelatihan setiap ada diadakan yach bu ?
Y	Iaa. Karena memang kan setiap ada pelatihan itu pasti kita disurati kesini supaya kita bisa ikut serta dalam kegiatan itu
R	Apakah semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh instansi terkait sudah cukup layak dan menopang dengan baik cara kerja SIKD ?
Y	Oh..Kalau mengenai perangkat-perangkat menurut saya sudah cukup baik yang telah disiapkan oleh instansi. Karena semuanya itu layak digunakan dalam mendukung kerja sistem.
R	Misalkan apa bu yang kita nilai kalau memang perangkat yang disediakan itu sudah cukup baik
Y	Yach seperti computer ini yang setiap staff yang memakai sitem itu disediakan satu computer satu orang jadi kita tidak perlu lagi ganti-gantian menggunakan computer karena sudah disiapkan masing-masing.
R	Oh iye buu..

Y	Ini juga seperti tempat kerja ini. Setiap orang itu sudah diberikan meja masing-masing untuk bekerja, jadi kita disini itu bekerja ditempat yang telah disediakan
R	Apakah tidak ada kendala jaringan internet pada penggunaan SIKD ini ?
Y	Ehhhh..Kalau soal jaringan internet itu bisa dikatakan sudah cukup baik tapi terkadang juga kita msih memiliki hambatan sedikit pada jaringan yang secara otomatis juga menghambat kerja kita. Jadi tergantung dari jaringan kalau jaringannya lagi bagus yach lancer, tapi kalau lagi jelek yach begitu kita terhambat lagi dalam penginputan. Tapi alhamdulillahnya jaringan itu kalau bermasalah tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama.
R	Bagaimana dengan keamanan sistem, apakah setiap pengguna SIKD memiliki password tersendiri untuk membuka sistem ?
Y	Ia..Setiap pengguna dari sistem mempunyai password tersendiri
R	Kenapa bu setiap pengguna SIKD ini perlu memiliki password tersendiri untuk membuka sistem
Y	Ia..karena masing-masing kan ada bagian-bagian yang telah ditentukan untuk dia input atau kerjakan disistem itu. Jadi kan biasanya juga ada yang komputernya bermasalah dan dia ingin menginput sesuatu, jadi biasanya dia pake computer lain lagi, jadi supaya data-datanya itu aman setiap pengguna itu memang diwajibkan untuk memiliki password tersendiri. Dan juga agar data-data dari setiap pengguna sistem itu bisa aman.
R	Bagaimana dengan akses informasi, siapa saja yang boleh mengakses informasi SIKD /
Y	Semua orang boleh mengakses informasi keuangan ini. Karena memang kan tujuan dari dibuatnya sistem ini itu supaya pemerintah lebih transparansi lagi terkait pengelolaan keuangan daerah
R	Berarti sekarang bu siapa saja yang mau melihat terkait pengelolaan keuangan dan juga laporannya itu sudah bisa langsung diakses ?
Y	Ia. Tapi dia hanya bisa sebatas melihat saja tidak mempunyai hak untuk mengubah atau apapun itu. Intinya Cuma sebatas melihat saja
R	Apakah dengan adanya SIKD ini dapat mengefisienkan waktu dalam penyusunan keuangan daerah ?

Y	Ia, kalau berbicara terkait efisiensi waktu itu ia sangat menghemat waktu sekali karena SIKD itu kan didalamnya sudah disiapkan bagian-bagiannya jadi tinggal kita langsung masukkan saja datanya, Kita tidak perlu repot-repot lagi mencatat panjang lebar. Sistem ini itu sangat mempermudah dan membuat kita sebagai para pengguna itu sangat bisa lebih mudah dan cepat lagi dalam bekerja, karena setiap ada data yang mau diinput itu kita hanya langsung buka sistem dan memasukkan data sesuai dengan format yang telah disiapkan didalamnya.
R	Apakah penggunaan SIKD ini sudah sesuai dengan standar operasional atau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah ?
Y	Ia. Kita disini itu bekerja dengan berlandaskan pada SOP dan juga peraturan yang ditetapkan oleh menteri keuangan terkait SIKD ini. Karena kedua hal itu adalah acuan utama kami dalam bekerja menggunakan sistem ini.
R	Upaya apa saja yang dilakukan instansi dalam hal mengoptimalkan penggunaan SIKD agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah ?
Y	Ehhhhh..setiap ada apa yach..hampir setiap tahun kan ada perubahan terkait sistem, jadi supaya lebih optimal itu kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu
R	Apakah dengan dilakukannya upaya tersebut penggunaan SIKD sudah berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ?
Y	Iya kalau berbicara terkait optimal dan kesesuaian standar itu, kita disini bisa menjamin iya karena Alhamdulillah kita disini itu bekerja dengan berpatokan pada prosedur dan peraturan pemerintah
R	Ohh iye bu. Berarti kita disini bisa menjamin bahwa penggunaan SIKD itu sudah optimal ?
Y	Iya sudah cukup cukup optimal penggunaannya
R	Oh iya bu. Mungkin hasil wawancara saya dengan ibu ini sudah lebih dari cukup memberikan gambaran terkait penggunaan SIKD ini. Terima kasih atas waktu yang telah ibu luangkan untuk saya
Y	Oh iaaa..sama-sama. Nanti kalau masih ada lagi data yang kita butuhkan bisa kesini lagi
R	Oh ia ibu.. makasih banyak bu...Kalau bagitu saya permisi dulu bu. Assalamu alaikum

**Transkrip wawancara tanggal 18 Mei 2018 antara pewawancara dengan informan**

Identitas informan

Nama : Lahamuddin

Jabatan : Kabid. Akuntansi dan Pelaporan

Pendidikan : S2 Akuntansi

Pewawancara	Hasil Wawancara
R	Assalamu alaikum wr wb pak..
L	Walaikum salam. Silahkan duduk. Ini ada apa yach ?
R	Maaf mengganggu pak.saya mahasiswa yang melakukan penelitian dikantor ini pak.
L	Oh iaa.. terkait apa judulta ?
R	Judulku pak yaitu "Optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Takalar (Studi kasus pada BPKD)
L	iaa. Jadi maksudnya ini kesaya mau apa ?
R	Begini pak ini kan judulku terkait SIKD dan metode yang saya gunakan dalam penelitian ini pak pake wawancara. Jadi maksud dan tujuan saya kesini itu pak mau melakukan wawancara terkait SIKD.
L	Wawancara..oh ia kebetulan sekarang lagi tidak sibuk kah jadi bisa jhe kalau mauki wawancara sekarang
R	Oh iye pak. Makasih sebelumnya pak.
L	Iye. Mulai mhe
R	Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi informasi ?
L	Sudah pasti harus memiliki keahlian khusus dalam hal komputer pastinya
R	Kenapa mesti pak seseorang harus memiliki keahlian khusus untuk bisa menggunakan SIKD ini ?
L	Karena, kalau kita menggunakan aplikasi SIKD ini kita harus mengetahui bagaimana untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, untuk itu harus menggunakan keahlian khusus dibidang itu. Tidak semua orang yang bisa menjalankan computer bisa menjalankan SIKD ini.
R	Apakah pengguna SIKD tersebut dibekali dengan

	berbagai pelatihan untuk mengelola data pada SIKD ?
L	Ahh..ia sudah jelas seperti itu. Artinya semua pengguna atau operator SIKD didalam mengoperasikan sistem ini. Dia harus sebelumnya...dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Karena memang dari awal adanya sistem ini kita disini pengguna sudah ikut pelatihan terkait sistem ini, dan 2 tahun lalu juga kita kembali ikut lagi pada pelatihan SIKD ini apakah itu pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pemerintah daerah sendiri, apakah itu pelatihan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat itu kita harus mengikuti pelatihanya,karena dari pelatihan itu dia bakal mengetahui apa yang sebelumnya dia belum mengerti terkait dari sistem tersebut. Seperti itu...
R	Berarti pak dalam hal ini setiap pengguna itu sangat penting untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait penggunaan SIKD ini ?
L	Ohh ia. Sudah jelas ituuu..
R	Apakah semua perangkat computer yang telah disiapkan oleh instansi apakah sudah layak dipakai dan sudah cukup menopang dengan baik cara kerja SIKD ?
L	Ahh... sampe saat ini semua perangkat computer yang disiapkan oleh pemerintah daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan itu bisa dikatakan sudah cukup baik menopang kerja SIKD ini. Kalau ditanyakan terkait layak tidaknya digunakan sudah pasti sangat layak sekali Karena semua perangkat komputer yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah itu sudah bisa mengakses semua dengan baik sistem informasi keuangan daerah yang kita gunakan sekarang ini.
R	Apakah tidak ada kendala jaringan internet pada penggunaan SIKD ?
L	Ahh.. Sampai saat ini alhamdulillah jaringan sangat mendukung sekali dan cukup baik dalam mengakses. Namun terkadang juga ada masalah, tidak selamanya bagus jaringan karena jaringan itu bukan yang nyata yang kita lihat yang bisa kita perbaiki seperti perangkat komputer. Ini persoalan jaringan seperti ini terkadang juga lambat, namun hal itu tidak terlalu lama dan kita sebagai pengguna bisa melanjutkan kembali proses penginputan. Jadi kalau ditanya soal apakah jaringan sudah cukup

	baik mendukung proses kerja SIKD pasti tentunya iaaa..
R	Bagaimana dengan keamanan sistem apakah setiap pengguna SIKD memiliki password untuk membuka sistem ?
L	Semua pengguna SIKD itu memiliki password tersendiri. Dalam artian para pengguna SIKD atau yang menginput data pada SIKD itu mempunyai password tersendiri untuk membuka sistem
R	Kenapa setiap pengguna SIKD harus memiliki password tersendiri untuk membuka sistem ?
L	Karena dia punya tanggung jawab, dia yang bertanggung jawab ahh..misalnya dibidang anggaran, dia yang menginput terkait semu tentang anggaran itu harus punya password tersendiri tentang masalah penginputan anggaran. Nah, dia tidak bisa sembarang orang yang menginput. Artinya kalau orang anggaran harus orang anggaran yang bertanggung jawab, kalau dibidang akuntansi itu masalah pencairan tidak mungkin orang anggaran yang akan mencairkan atau memproses pencairan. Makanya dia harus memiliki password tersendiri dalam hal sistem ini. Dan yang paling penting dari diterapkannya penggunaan password bagi setiap pengguna sistem agar keamanan data-data itu tetap terjaga. Namun selain dari penggunaitu sendiri yang mengetahui passwordnya ada pihak lain juga yang harus tahu karena misalkan dia terkendala datang maka pihak yang satu bisa membantu dulu dalam menginput data.
R	Bagaimana dengan akses informasi siapa saja yang boleh mengakses informasi SIKD ?
L	Kalau persoalan informasi semua lapisan masyarakat , semua publik bisa mengakses. Tetapi dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa melihat dari sisi laporan hasil keuangan daerah. Dia tidak bisa merubah, manambah dan mengurangi. Artinya dia sebatas hanya bisa melihat saja.
R	Apakah dengan adanya SIKD dapat mengefisienkan waktu dalam penyusunan keuangan daerah ?
L	Sangat..sangat mengefisienkan waktu. Karena kenapa dikatakan seperti itu, karena ahh..salah satu contoh pada saat permintaan pembayaran ditempat kami seorang tim verifikasi itu harus



	menyetujui apakah permintaan ini sudah benar atau belum, nah pada saat tim verifikasi ini lagi diluar daerah dia bisa mengakses dimanapun lewat aplikasi atau sistem ini dimana saja, dia bisa men OK kan permintaanya dengan melihat di sistem itu terkait surat pembayaran. Nah..seperti itu
R	Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?
L	Sudah sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah terkait SIKD yang telah disampaikan oleh menteri keuangan itu sudah sesuai dengan yang kita laksanakan disini. Karena memang yang menjadi pedoman para pengguna atau pemakai sistem informasi keuangan daerah (SIKD) di Badan pengelola keuangan daerah ini yaitu SOP dan juga peraturan menteri keuangan
R	Upaya apa saja yang dilakukan instansi dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD agar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
L	Nah.. masalah upaya-upaya ehh.. yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah ini hanya sebatas bagaimana terkait jaringan itu bisa lebih optimal lagi dalam artian jaringan tidak menghambat lagi dalam hal pekerjaan terkait SIKD ini karena salah satu penunjang optimalnya penggunaan SIKD yaitu soal jaringan. Jadi, disini kita perlu lagi bagaimana caranya agar jaringan tidak lagi menjadi penghambat pada sistem ini. Ahh.. mungkin seperti itu
R	Apakah dengan dilakukannya upaya tersebut penggunaan SIKD sudah berjalan optimal dan sesuai standar yang telah ditetapkan ?
L	Ohhh jelass. Karena salah satu penghambat kerja pada SIKD itu Cuma terkait dengan jaringan saja, jadi jika jaringan sudah cukup baik dan menopang kerja sistem maka penggunaanya ini sudah sangat optimal lagi
R	Oh iya pak. Mungkin hasil wawancara saya dengan bapak ini sudah lebih dari cukup meberikan gambaran terkait penggunaan SIKD ini. Terima kasih atas waktu yang telah bapak luangkan untuk saya

**Transkrip wawancara tanggal 23 Mei 2018 antara pewawancara dengan informan**

## Identitas informan

Nama : Hairuddin

Jabatan : Kabid. Anggaran

Pendidikan : S2

Pewawancara	Hasil Wawancara
R	Assalamu alaikum wr wb..Pak
H	Walaikum salam.. ada apa ?
R	Maaf mengganggu sebelumnya pak, ini saya yang beberapa minggu lalu sudah ajukan surat buat penelitian dikantor ini pak, dan alhamdulillah surat saya direspon dengan baik oleh bapak kepala BPKD dan sudah diberikan izin buat meneliti disini. Maksud dan tujuan saya ini bu untuk melakukan wawancara ke bapak terkait judul penelitian saya pak
H	Oh iye, yang itu hari datang kesini dichh..tapi saya sibuk itu hari
R	Iye pak.. Jadi ini pak mau lanjutkan lagi yang sempat tertunda itu hari
H	Oh iye silahkan kebetulan hari ini tidak terlalu banyak jhee pekerjaan
R	Iye pak. Makasih sebelumnya atas waktu yang kita luangkan untuk saya pak
H	Oh iyeee..
R	Maaf pak jadi saya bisa mulai sekarang wawancaranya ?
H	Iaa..silahkan
R	Apakah pengguna sistem informasi keuangan daerah (SIKD) harus memiliki keahlian khusus dalam hal teknologi informasi ?
H	Iaa. Jadi dalam hal penggunaan sistem informasi keuangan daerah ini memang harus memilki keahlian khusus. Jadi, mereka semua sebelumnya harus dilatih dan diberikan bekal untuk mengoperasikan sistem ini. Dan juga para pengguna SIKD diinstansi ini juga dari awal

	penggunaan sistem sudah ikut melakukan berbagai pelatihan terkait sistem ini. Jadi mereka sudah cukup tahu dan paham terkait sistem ini.
R	Berarti tidak hanya sekedar bisa menjalankan komputer saja pak, tapi perlu juga di berikan pelatihan khusus dalam hal penggunaan sistem ini ?
H	Oh ia jelas itu..
R	Apakah semua perangkat komputer yang telah disiapkan oleh instansi terkait sudah cukup menopang dengan baik kerja SIKD ?
H	Ohh ia pasti itu. Alhamdulillah pemerintah Takalar itu memberikan fasilitas yang sangat baik bagi para staff disini. Begitupun halnya perangkat komputer sudah cukup baik dan layak sekali digunakan oleh para pengguna SIKD. Kebetulan di sini itu para pengguna SIKD sudah difasilitasi komputer setiap orangnya.
R	Oh berarti kalau terkait soal perangkat-perangkat komputer itu sudah cukup terfasilitasi yach pak
H	laa.. sangat difasilitasi semua pekerja disini
R	Apakah tidak ada kendala jaringan internet pada penggunaan SIKD ?
H	Yachh..sampe sekarang alhamdulillah jaringan itu sudah sangat bagus khususnya bagi para pengguna SIKD dalam melakukan penginputan. Walaupun terkadang jaringan ini pasti ada aja masalahnya. Apalagi kalau yang menggunakan itu sudah melebihi kapasitas penggunaannya itu terkadang cukup lambat dalam mengakses sistem SIKD ini.
R	Lalu pak bagaimana untuk mengatasi apabila hal itu terjadi ?
H	Yachhh..kita hanya tunggu loading saja sampai dia bisa normal kembali. Karena jaringan kan kita tidak bisa prediksi kapan dia lancar dan tidaknya
R	Bagaimana dengan keamanan sistem apakah setiap pengguna SIKD memiliki password untuk membuka sistem ?
H	laa pasti itu. Jadi ada level-level tertentu dalam hal penggunaan sistem ini. Jadi setiap user atau pengguna SIKD itu memiliki masing-masing password untuk membuka sistem. Kenapa? Karena setiap pengguna kan tugasnya beda-beda jadi untuk meminimalisir agar kesalahan kerja

	<p>untuk para pengguna itu dengan diterapkannya pengguna password untuk masing-masing pengguna sistem. Dan juga terkait keamanan eksternalnya itu kita diinstansi ini setiap ruangnya sudah memiliki masing-masing cctv agar keamanannya itu lebih ketat lagi.</p>
R	<p>Bagaimana dengan akses informasi siapa saja yang boleh mengakses informasi SIKD ?</p>
H	<p>Sebenarnya dari segi sisi penganggaran itu semua bisa mengakses, tapi kan dalam hal penginputan, dalam hal pergantian-pergantian data itu harus orang-orang terkait atau para pengguna SIKD yang boleh melakukannya. Jadi untuk ke publik itu mereka hanya sebatas mengamati dan melihat saja tanpa memiliki wewenang untuk mengubah ataupun mengganti data tersebut. Karena yang memiliki wewenang itu hanya orang-orang disini yaitu para pemakai SIKD</p>
R	<p>Apakah dengan adanya SIKD dapat mengefisienkan waktu dalam hal penyusunan keuangan daerah ?</p>
H	<p>Iya..ini sangat membantu menghemat waktu, karena sistemnya sudah ada tinggal langsung menginput data-data tertentu sehingga tidak lagi..misalnya dalam hal struktur-struktur penganggaran itu sudah tertata didalam sistem jadi tinggal langsung diinput masuk data terkait saja. Jadi dengan adanya sistem ini itu sangat-sangat mengefisienkan waktu sekali. Kemudian dimana saja kapan saja kalau dalam hal penganggaran itu bisa melakukan penginputan. Karena sistem ini itu waktunya tidak terbatas dalam hal penginputan</p>
R	<p>Apakah penggunaan sistem informasi keuangan daerah ini sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?</p>
H	<p>Iya..kami disini sebagai pengguna dan pemakai SIKD itu dalam bekerja sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk sementara ini kami dari sistem informasi keuangan daerah Pemerintahan Takalar ini sudah diakui. Jadi semua kan..semua laporan-laporan keuangan itu link kepada pemerintah pusat. Jadi Alhamdulillah kabupaten Takalar setiap laporan-laporannya itu sudah</p>

	semuanya link terhdap pemrintah pusat. Kita disini itu dalam hal penggunaan SIKD ini itu slalu berpedoman pada peraturan pemerintah terkait dalam hal penggunaan SIKD ini
R	Upaya apa saja yang dilakukan instansi dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?
H	Dalam hal mengoptimalkan penggunaan sistem ini, kami disini selalu membekali dan melatih para operator-operator atau pengguna sistem SIKD ini untuk lebih mendalami lagi kerja sistem tersebut. Jadi, jika dia mengalami masalah terkait sistem dia lebih mudah untuk menyelesaikannya.
R	Apakah dengan dilakukannya upaya tersebut penggunaan SIKD sudah berjalan optimal dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah ?
H	Iya jelas itu..karena yang menjadi penunjang optimal tidaknya penggunaan sistem ini kan kita kembali lagi pada sumber daya manusianya atau pengguna sistem tersebut. Jadi jika penggunaanya lebih mengetahui sistem tersebut melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakann terkait SIKD maka penggunaannya itu bakal leboh optimal lagi
R	Oh iya pak. Mungkin hasil wawancara saya dengan bapak ini sudah lebih dari cukup meberikan gambaran terkait penggunaan SIKD ini. Terimah kasih atas waktu yang telah bapak luangkan untuk saya
H	Oh iaaa..sama-sama. Maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan
R	Oh tidak pak..ini sudah Alhamdulillah sekali. Sekali lagi terimah kasi banyak pak. Maaf sudah merepotkan pak
H	Tidak apa-apa jhe. Nanti kalau masih dibutuhkan kach lagi bisa jhe kesini lagi
R	Makasih banyak pak. Kalau begitu saya permisi dulu pak. Assalamu alaikum
H	Walaikum salam

## Lampiran 5

### RIWAYAT HIDUP



**Rustina**, dilahirkan di Takalar pada tanggal 07 Juli 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan Mappasewa dan Rampu. Penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2001 sampai 2007 di SDN.Centre Mangadu pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Marbo, tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Takalar sampai tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014, penulis diterima pada Jurusan Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.